

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI TENGGER JAWA TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

**SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL
DI TENGER JAWA TIMUR**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997**

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI TENGGER JAWA TIMUR

Tim Penyusun : Drs. HARRY WALUYO

Penyunting : Dra. Lindy Astuti Setiawati

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang -undang

Diterbitkan oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai
Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1997

Edisi I 1997

Dicetak Oleh : Cv. Putra Sejati Raya

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan Buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional .

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat keuntungan-keuntungan . Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang .

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Februari 1997
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof . Dr. Edi Sedyawati

PRAKATA

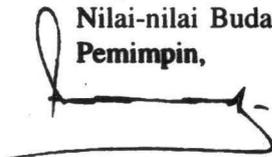
Pengenalan dan identifikasi terhadap hasil budaya merupakan suatu usaha yang sangat berharga sehingga perlu dijalan secara terus menerus. Hal ini menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkuat identitas dan kesatuan nasional. Usaha ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghayatan masyarakat terutama generasi muda terhadap warisan budaya .

Bertitik tolak dari kondisi tersebut Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek pengkajian dan pembinaan Nilai-Nilai Budaya pusat menggali nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa atau daerah. Untuk melestarikannya, dilakukan penerbitan hasil-hasil penelitian yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Penerbitan buku berjudul *Sistem Pemerintahan Tradisional di Tengger Jawa Timur* upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kepada tim penulis dan semua pihak baik lembaga pemerintah maupun swasta yang telah membantu sehingga terwujudnya karya ini disampaikan terima kasih .

Kami menyadari bahwa karya tulis ini belum memadai. diharakan kekurangan -kekurangan itu dapat disepurnakanpada masa yang akan datang . Semoga karya tulis ini ada manfaatnya bagi para pembaca serta memberikan petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Februari 1997
Proyek Pengkajiandan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat
Pemimpin,



Soeyanto BA
NIP . 130604670

DAFTAR ISI

SambutanDirektur Jenderal Kebudayaan	i
Prakata	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR PETA	iv
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar	1
B. Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Metodologi Penelitian	5
E. Sistematika Tulisan	6
BAB II MASYARAKAT TENGGER	
A. Letak dan Keadaan Alam	7
B. Sejarah dan Legenda	11
C. Penduduk	12
D. Ekonomi	15
E. Agama, Adat dan Kepercayaan	18
F. Sosial	25
BAB III PEMERINTAHAN TRADISIONAL	
A. Struktur Pemerintahan Desa	29
B. Struktur Pemerintahan Adat dan Agama	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	62

DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN	
1. Pedoman Wawancara Pemerintahan Tradisional	67

DAFTAR PETA

No.	Halaman
1. Peta lokasi Desa Sampel	69

DAFTAR BAGAN

No.	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan dan Perangkat Desa Ngadisari	102
2. Bagan Struktur Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Desa Ngadisari	103
3. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	104
4. Bagan Stuktur Hansip	105

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Pintu masuk gapura di kawasan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo	
2.	Loket karcis masuk Gunung Bromo entrance fee Mt. Bromo Rp 2.100,00	
3.	Petugas retribusi parkir kendaraan di Desa Ngadisari ...	
4.	Situasi terminal Cemoro Lawang	
5.	Panorama Gunung Bromo	
6.	Panorama Gunung Batok	
7.	Tempat sembahyang masyarakat Tengger yang relatif luas di gunung Bromo	
8.	Suasana terminal Ngadisari dan toko souvenir tampak lengang sejak dibukanya terminal Cemoro Lawang	
9.	Salah satu homestay milik penduduk Desa Ngadisari	
10.	Susunan personil yang bertugas di Desa Ngadisari	
11.	Jadwal mekanisme tahunan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Jawa Timur	
12.	Struktur organisasi Lembaga Masyarakat Desa (LMD) ...	
13.	Kantor Desa Ngadisari	
14.	Seorang dukun sedang membacakan mantra untuk hewan korban sebagai salah satu syarat pelaksanaan pesta perkawinan	
15.	Kentongan sebagai tanda informasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR

Pada hakekatnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu terikat dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia menciptakan aturan-aturan sosial yang berfungsi sebagai pedoman bertindak untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia juga menciptakan perangkat pengendalian sosial yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam menjalankan aturan-aturan sosial dan pengendalian sosial, manusia menciptakan sistem pembagian kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai pranata sosial yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, dalam setiap komunitas, diperlukan sistem pemerintahan yang berfungsi mengatur alokasi dan distribusi sumber daya yang tersedia di masyarakatnya agar sistem kehidupan sosial dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Menurut **Encyclopedia of Anthropology** (1976: 224), pemerintah bukan hanya berkenaan dengan kualitas kepribadian atau kharisma seorang pemimpin, melainkan lebih ditekankan pada pelaksanaan peranan dalam suatu konteks sosial. Jadi, pemerintahan adalah suatu proses interaksi antara pemimpin dengan anggota-anggota lain dalam

Dalam struktur sosial, seorang pemimpin umumnya menduduki suatu posisi yang menjadi titik penentu dalam pengambilan keputusan. Karena itu, pemerintahan mestilah dilihat dalam konteks kelompok atau tindakan kolektif. Seorang pemimpin dalam situasi sosial tertentu, tidak lagi berfungsi sebagai pemimpin dalam situasi yang lain.

Sementara itu pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan, bahkan keduanya dianggap bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama, keduanya saling melengkapi. **Max Weber** membedakan kekuasaan yang ideal sebagai berikut : 1) kekuasaan tradisional yang keabsahannya didasarkan atas "suatu kepercayaan yang telah ada mapan pada **kesucian tradisi** yang amat kuno," 2) kekuasaan yang **rasional** atau berdasarkan pada hukum (*legal*) yang didasarkan atas kepercayaan terhadap peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, yang berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah-perintah, dan 3) kekuasaan **kharismatik** atau pribadi, yang didapatkan dari pengabdian diri terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang dan dari corak-corak tata tertib yang diperlihatkan olehnya (Sartono Kartodirdjo, 1984:166)

Berdasarkan jenis-jenis kekuasaan yang ideal tersebut, **Max Weber** menyatakan bahwa konsep tentang pemimpin tradisional mestilah cocok dengan ciri-ciri kekuasaan tradisional yang dimilikinya. Sehingga dapat pula kita bandingkan dengan kekuasaan rasional yang dimiliki oleh umumnya pemimpin yang pada masa sekarang sering disebut-sebut sebagai pemerintahan formal, yaitu pemimpin resmi yang ditentukan menurut hukum yang berlaku. Jenis kekuasaan ketiga, yaitu kharismatik atau berkepribadian dalam konteks kehidupan masyarakat setempat, dapat diletakkan sebagai corak yang bisa dimiliki oleh pemimpin tradisional maupun pemimpin rasional (formal).

Berbagai bentuk pemerintahan tradisional yang pernah tumbuh dan berkembang di berbagai suku bangsa di Indonesia. Ciri-cirinya memang tidak jauh dari pembagian sistem kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh **Max Weber**, yaitu bahwa para pemimpinnya memiliki

dikemukakan oleh **Max Weber**, yaitu bahwa para pemimpinnya memiliki kekuasaan karena mewarisinya, berkat adanya suatu keyakinan yang dimantapkan oleh kesucian tradisi yang diterima dan dijalankan oleh warganya. Salah satu aspek tradisi pewarisan kekuasaan tersebut adalah **keturunan** dalam arti adanya hubungan darah baik secara *affinal* maupun *consanguinal*. Menurut tradisi ini hanya seorang yang memiliki hubungan darah atau keturunan langsung dari pemimpin terdahulu yang berhak mewarisi kekuasaan sebagai pemimpin golongannya. Tradisi pemerintahan tradisional yang berlandaskan pada hubungan keturunan atau cikal bakal yang terkait erat dengan sistem kekerabatan ataupun sistem kepercayaan yang dimantapkan dalam kehidupan sosial mereka.

Pemerintahan tradisional ialah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, ekonomi, religi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah dikenal di masa lampau.

B. MASALAH

Dalam kehidupan sehari-hari, masih sering kita jumpai adanya kelompok-kelompok masyarakat yang kukuh mempertahankan adat istiadat dan pengendalian sosial yang ketat, terutama di desa-desa. Berbeda dengan kehidupan di kota besar, warga masyarakat terpecah-pecah ke dalam struktur-struktur sosial yang longgar, mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Oleh karena itu, struktur masyarakatnya bersifat longgar (*loosely structure*).

Sistem pemerintahan di pedesaan becorak tradisional. Berbeda dengan sistem pemerintahan di kota yang bersifat modern. Permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah apa dan bagaimana sistem pemerintahan tradisional menjanjatkan aturan-aturannya dalam struktur pemerintahan desa dan dalam struktur pemerintahan agama dan adat? Sejalan itu, bagaimana pengaruh sistem pemerintahan modern (nasional) yang menjalankan peraturan-peraturannya atas dasar hukum yang rasional terhadap struktur pemerintahan ada. Kedua sistem pemerintahan tersebut dapat dibedakan secara konseptual, namun secara operasional

tidak mudah dibedakan dengan tegas.

Sejak pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tampak bahwa masalah utama yang dihadapi pemerintah adalah keberagaman struktur pemerintahan adat yang pada masa lampau mempunyai aturan-aturan yang ketat dan terus dilestarikan sampai masa sekarang. Tantangan yang dihadapi sistem pemerintahan adat mengacu pada sistem pemerintahan kerajaan yang pada masa lampau mempunyai batas kekuasaan dan wewenang di daerahnya masing-masing, sedangkan sistem pemerintahan nasional atau sistem pemerintahan desa mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.

Pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur pemerintahan adat yang berlaku pada masyarakat?
2. Bagaimana mekanismenya dalam kehidupan bermasyarakat?
3. Bagaimana struktur pemerintahan desa menjalankan peranannya pada masyarakat yang masih ketat memegang adat?
4. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung sistem pemerintahan tradisional?

Adapun ruang lingkup wilayah yang sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka lokasi yang menjadi batasan perekaman adalah desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, kabupaten Probolinggo, propinsi Jawa Timur.

C. TUJUAN

Berkenaan masalah di atas, perekaman tertulis ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemerintahan tradisional yaitu sistem pemerintahan yang tumbuh dan berkembang di daerah sesuai dengan kebudayaan dan latar sejarah daerah tersebut. Data dan informasi ini sangat penting artinya untuk membantu penyusunan sistem pemerintahan dalam skala nasional, selain itu juga sebagai dokumentasi khasanah

kebudayaan bangsa.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Perekaman tertulis ini bersifat deskriptif analisis. Data dan informasi diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan terutama dari hasil-hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan dan Masyarakat Tengger, Universitas Jember.

Penelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh dari data kepustakaan. Wawancara dengan sejumlah nara sumber dengan tujuan memperoleh penjelasan dan pengertian tentang data dan informasi yang telah didapat melalui studi kepustakaan merupakan hal yang sangat membantu menyempurnakan hasil yang telah dicapai. Selain menggunakan metode wawancara, juga dilakukan observasi langsung di lapangan yang didukung dengan foto-foto yang merupakan bagian dari hasil penelitian lapangan.

Langkah awal dari perekaman ini adalah mendeskripsikan sistem pemerintahan tradisional yang dijadikan obyek perekaman. Setelah itu berusaha untuk menemukenali nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dan pada akhirnya mencoba menghubungkan antara sistem pemerintahan tradisional yang masih digunakan pada masyarakat bersangkutan di dalam sistem pemerintahan desa (nasional) yang berlaku.

Adapun jadual pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan											
	1995						1996					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Studi Kepustakaan												
Penyusunan Kerangka Acuan												
Penyusunan Pedoman Perekaman Data												
Perekaman Data												
Pengolahan Data												

Penyusunan Laporan dan Deskripsi

Penyempurnaan, Pengetikan, dan Penggandaan

E. SISTEMATIKA TULISAN

Bagian pertama tulisan dijelaskan latar penelitian, pokok-pokok masalah penelitian, tujuan, metodologi penelitian, dan sistematika tulisan yang merupakan gambaran singkat tentang keseluruhan isi tulisan.

Bagian kedua tulisan dijelaskan gambaran umum masyarakat Tengger tentang sejarah dan legenda, penduduk, sosial ekonomi, agama dan kepercayaan, dan kehidupan sosial.

Bagian ketiga tulisan merupakan bagian pokok tulisan tentang struktur pemerintahan desa dan struktur pemerintahan adat yang dianalisis dalam kerangka pendekatan struktur sosial.

Bagian akhir tulisan dibuat kesimpulan dan saran yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan di bidang kebudayaan, khususnya yang mendukung sistem pemerintahan desa (nasional).

BAB II

MASYARAKAT DESA NGADISARI

A. LETAK DAN KEADAAN ALAM

Desa Ngadisari terletak di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur (Peta 1). Desa Ngadisari terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 1.800 meter dari permukaan laut. Desa-desanya lain yang berada di Kecamatan Sukapura yakni Desa Ngepang, Desa Sukapura, Desa Patal, Desa Jetak, dan Desa Wonotoro. Dari semua desa tersebut, Desa Ngadisari, Desa Jetak, dan Desa Wonotoro termasuk desa tertua yang terdapat di wilayah Kecamatan Sukapura. Selain itu, Desa Ngadisari terletak di ketinggian dengan jarak dari Gunung Bromo lebih kurang 5 km. Oleh karena itu, suhu udara di Desa Ngadisari pada musim penghujan antara 10^o - 20^o Celcius, sedangkan pada musim kemarau antara 2^o - 10^o Celcius. Curah hujan yang cukup tinggi, sangat berpengaruh terhadap usaha pertanian sayur mayur yang sangat cocok dengan iklim dan tanah di sekitar pegunungan Tengger.

Kondisi tanah di sekitar Desa Ngadisari dan desa-desanya lain di sekitarnya sama, berupa campuran tanah liat dan tanah padas. Tanah semacam itu termasuk jenis *padsol*, yaitu tanah yang bahan induknya berasal dari batuan vulkanis yang tidak kompak, gembur, seperti pasir tetapi amat subur. Berbagai jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah

ini adalah teh, kopi, kina, kentang, bawang, kubis (kol), dan wortel. Padi tidak cocok di daerah ini, karena tanahnya berbukit-bukit dan miring, sedangkan hawanyapun amat dingin.

Luas tanah Desa Ngadisari 775,300 ha yang terdiri dari tanah pekarangan dan bangunan, serta tanah tegalan dan perkebunan seluas 456 ha. Sejak tahun 1995, Desa Ngadisari mempunyai Tanah Kas Desa yang luasnya 1 ha. Sampai penelitian ini dilakukan tanah desa tersebut belum digarap. Di sekitar Desa Ngadisari terdapat hutan lindung dikelola oleh Taman Wisata Bromo Semeru seluas 276.357 ha.

Jenis tanaman di sekitar pegunungan Tengger adalah cemara, pinus, pakis dan akasia. Pihak kehutanan (PHPA) mengusahakan penanaman pohon cemara dan akasia untuk keperluan penghijauan. Di samping itu, penduduk Desa Ngadisari mempergunakan batang dan ranting pohon cemara untuk bahan bakar dapur (*pawon*) dan untuk berdiang (*gegani*) agar dapat mengatasi hawa dingin.

Jenis tanaman lain yang diusahakan penduduk Desa Ngadisari sebelum tahun 1970-an adalah jagung dan ketela, sejak pemerintah aktif melalui petugas penyuluhan pertanian, penduduk dapat menikmati tanaman produktif seperti kentang, wortel, kubis (kol), bawang prei, dan jagung yang pada mulanya merupakan tanaman pokok penduduk. Desa ini, tanaman jagung dianggap tidak produktif lagi karena memerlukan waktu hampir satu tahun sejak ditanam sampai dapat dipetik hasilnya, sedangkan tanaman sayur mayur dapat panen 2 sampai 3 kali dalam setahun dan memberi keuntungan yang lebih besar dibandingkan jagung atau ketela.

Di samping jenis tanaman yang bisa hidup subur di Desa Ngadisari, adapula binatang buas. Menurut salah seorang penduduk, di sekitar Lautan Pasir masih terdapat binatang buas, seperti harimau yang keluar pada malam hari di sekitar Lautan Pasir. Binatang yang dipelihara oleh penduduk yakni sapi, kerbau, kambing, kuda dan ayam. Binatang-binatang tersebut dipelihara untuk keperluan upacara adat, kecuali kuda pada mulanya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, namun sejak Bromo dijadikan Taman Wisata Bromo Semeru, fungsi kuda kemudian

beralih menjadi kendaraan angkutan bagi wisatawan yang akan berwisata dari Cemoro Lawang ke Gunung Bromo pergi pulang (pp).

Secara administratif, batas Desa Ngadisari sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, sebelah Barat dengan Kabupaten Malang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wonotoro.

Jarak Desa Ngadisari ke pusat pemerintah kecamatan 14 km, jarak dari ibu kota kabupaten/kotamadya Dati III Probolinggo sejauh 42 km, jarak dari ibu kota propinsi Dati I sejauh 131 km, dan jarak dari ibu kota negara sejauh 1.031 km.

Kondisi jalan dari ibu kota kabupaten/kotamadya Dati II Probolinggo sudah diaspal halus dan dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi dan umum. Jenis kendaraan umum dari Probolinggo ke Cemoro Lawang antara lain jeep toyota, bus "Harapan Kita" dan colt. Ongkos dari kendaraan umum, baik bus maupun colt, dari terminal Probolinggo ke Cemoro Lawang sebesar Rp 1.200,00 sekali jalan sementara itu jam operasi kendaraan umum dimulai dari ukul 05.00 pagi sampai pukul 19.00 malam.

Semua pengunjung yang akan menuju ke Taman Wisata Bromo Semeru harus membayar retribusi jalan yang dikelola oleh Taman Wisata Bromo Semeru yang letaknya sangat dekat dengan perbatasan Desa Wonotoro dengan Desa Ngadisari. Uang retribusi untuk memasuki Taman Wisata Bromo Semeru sebesar Rp 2.100,00 per orang (Gambar 1 dan 2). Di samping itu, sekitar 100 meter dari pos retribusi Taman Wisata Bromo Semeru terdapat Pos Hansip. Petugas Hansip Desa Ngadisari akan menyetop kendaraan pribadi atau umum yang lewat jalan Desa Bromo sebesar Rp 1.000,00 sehari, meskipun kendaraan pribadi atau umum pergi pulang lebih dari satu kali. (Gambar 3).

Ongkos kendaraan colt (taksi) dari Terminal Angkutan Umum Probolinggo ke Terminal Cemoro Lawang sebesar Rp 1.200,00 per orang. Kendaraan tersebut beroperasi sejak pukul 05.00 pagi hingga malam hari sekitar pukul 19.00 malam, (Gambar 4). Pada hari-hari besar, seperti

Hari Kasodo, banyak wisatawan yang menuju ke Bromo pada malam hari dengan memesan kendaraan carteran. Pada saat ini operasi kendaraan colt diperpanjang hingga jauh malam.

Di atas telah dikatakan bahwa semua jenis kendaraan pribadi dan umum yang akan menuju Taman Wisata Bromo Semeru harus membayar retribusi yang ditarik oleh petugas Taman Wisata Bromo Semeru dan petugas Hansip dari Desa Ngadisari. Terminal lama yang terletak di Desa Ngadisari masih digunakan untuk parkir kendaraan jeep toyota yang dapat disewa oleh wisatawan yang akan ke Pananjakan II atau I untuk melihat keindahan alam pegunungan Tengger pada saat matahari terbit. Sewa jeep ke Pananjakan II pp sebesar rp 40.000,00, sedangkan ke Pananjakan I pp sebesar Rp 70.000,00 - Rp 100.000,00. Aktivitas jeep-jeep tersebut dimulai pukul 04.00 dini hari sampai pukul 19.00 malam. Semua pemilik jeep adalah penduduk Desa Ngadisari. Setiap kali membawa penumpang, jeep-jeep tersebut akan dikenakan retribusi desa sebesar Rp 1.000,00 sekali jalan. Selain itu, pengaturan keberangkatan jeep-jeep diatur oleh perangkat desa (hansip) yang piket pada hari itu sampai pukul 21.00. Namun demikian, tidak berarti bahwa hanya jam-jam tersebut para wisatawan bisa mencarter jeep, tetapi setiap saat diperlukan, jeep-jeep tersebut siap mengantar wisatawan di sekitar Taman Wisata Bromo Semeru.

Dari Cemoro Lawang ke Gunung Bromo, wisatawan bisa naik kuda sewa dengan tarif yaitu Cemoro Lawang - Gunung Bromo Rp 5.000,00, Gunung Bromo - Cemoro Lawang Rp 5.000,00, Cemorong Lawang - Gunung bromo pp Rp 10.000,00, dan Sewa 1 jam Rp 10.000,00.

Wisatawan dapat menikmati keindahan pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Lautan Pasir yang sangat luas dan indah (Gambar 5 dan 6). Selama itu, di Lautan Pasir ini sejak 1992 terdapat bangunan pura (*poten*) yang digunakan sebagai tempat persembahyangan masyarakat Tengger yang mayoritas beragama Hindu Tengger, (Gambar 7).

Lalu lintas transportasi kuda ini dikelola dan diatur oleh sebuah Paguyuban Kuda Sewa, demikian pula masalah pengaturan jadwal atau

giliran setiap kuda mengangkut penumpang. Iuran wajib yang harus diserahkan **Paguyuban Kuda Sewa** sebesar Rp 500,00 setiap membawa penumpang dari dan ke Cemoro Lawang-Bromo.

B. SEJARAH DAN LEGENDA

Data tertua diperoleh dari prasasti *Walandit* yang berangka tahun 851 saka atau 929 masehi. Isi prasasti menyebutkan bahwa daerah ini dibebaskan dari pembayaran pajak karena dianggap sebagai tanah suci yang penghuninya dianggap sebagai abdi spiritual yang patuh (Edy Burhan Arifin, 1993/1994:14).

Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa sekitar abad IX dan X, daerah pegunungan Tengger merupakan daerah yang disucikan oleh Kerajaan Kediri yang berpusat di kali Brantas. Periode berikutnya, daerah ini dikuasai oleh Majapahit yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat Tengger sekarang. Beberapa bukti yang dapat menguatkan hal tersebut yakni dengan dipergunakannya alat *prasen* yang berfungsi sebagai wadah air suci yang digunakan dalam setiap upacara agama. Alat ini terbuat dari bahan kuningan. Pada bagian luar terdapat gambar dewa dan zodiak Hindu. *Prasen* tersebut berangka tahun 1243-1352 tahun saka atau 1321-1430 tahun masehi. Tahun-tahun ini merupakan masa kejayaan Majapahit. Pada abad selanjutnya, bersamaan dengan masuknya Islam di Jawa abad XV (sumber lain mengatakan Islam masuk di Samudera Pasai abad XIII). Namun, secara politis, kerajaan Islam tertua di Jawa terdapat di Demak pada abad XVI, tepatnya tahun 1527 yang berhasil meruntuhkan kejayaan Majapahit.

Menurut **Hefner**, masyarakat Tengger pada zaman Islam pernah ditaklukan oleh Sultan Agung, Raja Mataram. Selama periode abad XVII-XVIII, pengaruh budaya Mataram merebak sampai ke wilayah pegunungan Tengger dan sekitarnya. Nilai-nilai budaya yang terpengaruh oleh budaya Mataram yakni terlihat dari etiket atau kebiasaan, bahasa, dan strata sosial (Hefner, 1989:29).

Berdasarkan legenda yang diketahui luas di kalangan masyarakat, orang Tengger percaya bahwa mereka adalah keturunan Majapahit.

Dahulu kala, Raja Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya melarikan diri bersama para pengikutnya ke daerah pegunungan Tengger karena terdesak oleh pasukan Raden Patah, putranya sendiri yang telah masuk Islam. Karena Raja Brawijaya tidak mau memeluk agama Islam, Raja Brawijaya melarikan diri ke Peleran, tempat peristirahatan yang berada di sekitar pegunungan Tengger.

Di daerah Tengger tersebut Raja Brawijaya belum merasa aman. Raja Brawijaya khawatir Raden Patah akan menyusulnya. Raja Brawijaya bersama para pengikutnya yang masih setia meneruskan perjalanan ke tempat yang aman di daerah Banyuwangi kemudian menyeberang ke Pulau Bali dan akhirnya menetap di Bali diikuti oleh keluarga raja, para punggawa dan para pendeta. Sedangkan pengikutnya yang lain tetap tinggal di daerah Pegunungan Tengger adalah rakyat kebanyakan yang hidup dari bercocok tanam (Harry Waluyo dkk, 1993:32).

Sejak tahun 1707, ketika pasukan Belanda melakukan ekspedisi ke daerah Pasuruan, 1723 ke daerah Malang, 1785 ke daerah Tosari sampai saat ini, komuniti masyarakat Tengger tersebar di wilayah kabupaten Probolinggo, kabupaten Malang, kabupaten Pasuruan, dan kabupaten Lumajang yang seluruhnya berada di Propinsi Jawa Timur.

C. PENDUDUK

Jumlah penduduk Desa Ngadisari tahun 1991 berjumlah 1443 jiwa. Data bulan Januari 1995 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Ngadisari berjumlah 1482 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 704 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 778 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk yang sudah berkeluarga sebanyak 333 KK yang seluruhnya berstatus sebagai WNI. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penambahan penduduk desa Ngadisari selama 4 tahun terakhir hanya 39 jiwa. Pertumbuhan penduduk per tahun 10,2 persen. Berdasarkan informasi dari Ketua LKMD diperoleh keterangan bahwa penduduk Desa Ngadisari aktif menggunakan KB dengan alat IUD sehingga penambahan penduduknya relatif kecil. Penduduk Tengger termasuk penganut paham monogami dan mempertahankan perkawinan

endogami di antara suku bangsa Tengger. Dengan demikian, perkembangan penduduk Tengger relatif stabil dibandingkan dengan luas wilayah 775,300 ha. Bagi penduduk Desa Ngadisari yang akan menikah dengan orang luar suku bangsa Tengger harus mengikuti adat istiadat Tengger, termasuk pindah dari agama non-Hindu ke agama Hindu Tengger.

Mobilitas sosial penduduk Tengger relatif rendah, hanya beberapa orang yang melakukan aktivitas perdagangan sayur mayur ke luar propinsi Jawa Timur, seperti ke Jawa Tengah, atau ke Kalimantan. Beberapa orang tua Tengger banyak menghabiskan waktu mereka di wilayah Tengger atau dalam pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penduduk Desa Ngadisari jarang sekali yang keluar Jawa. Seorang penduduk mengatakan bahwa ia merasa takut pergi ke luar Jawa atau menyeberang lautan ke Sumatera karena mereka merasa asing melihat laut, apalagi naik pesawat terbang.

Jumlah penduduk berdasarkan usia pendidikan di Desa Ngadisari dapat dilihat pada tabel di bawah in.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Usia Pendidikan

No.	Usia	Jumlah
1	0-6	87
2	7-15	253
3	16-19	523
4	20-26	174
5	27-40	328
Jumlah		1.365

Sumber: Monografi Desa Ngadisari, Januari 1995.

Berdasarkan data di atas data usia penduduk di atas 40 tahun berjumlah 117 orang. Menurut sistem kategorisasi BPS, usia produktif

dihitung dari usia 64 tahun ke atas. Data Monografi Desa 1995 menggunakan sistem kategori usia penduduk yang produktif (kelompok tenaga kerja) adalah penduduk yang berusia 20-40 tahun yakni sebesar 502 orang. Pembagian kelompok tenaga kerja tersebut berdasarkan hasil pengamatan di lapangan masih banyak penduduk yang berusia lebih dari 50 tahun yang bekerja di pertanian maupun di bidang pariwisata (kuda sewa).

Berdasarkan data Monografi keadaan bulan Januari 1995 diperoleh keterangan bahwa sejak periode Mendikbud Prof. Fuad Hassan sampai periode Mendikbud Prof. Wardiman, Desa Ngadisari telah dinyatakan sebagai daerah bebas tiga buta yang secara formal dibedakan berdasarkan jumlah lulusan pendidikan umum (SD-SMTA) berjumlah 1.366 orang dan lulusan perguruan tinggi sejumlah 10 orang.

Pada tahun 1972, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Sukapura didirikan oleh pemerintah, dan pada tahun 1987 pengurus PGRI telah merintis berdirinya SMA PGRI di kecamatan Sukapura.

Pada awal perkembangannya, lembaga pendidikan formal di Ngadisari kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Banyaknya pekerjaan yang dibebankan kepada anak-anak seperti mencari kayu bakar, mengambil air, mencari rumput atau membantu pekerjaan di ladang. Kemudian kurangnya rangsangan orang tua memberi motivasi kepada anak-anaknya agar giat belajar disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, bahkan tidak jarang orang-orang tua di sana yang tidak pernah mengenyam pendidikan tidak memotivasi anaknya untuk belajar di pendidikan formal. Di samping itu para guru sebagian berasal dari luar daerah sehingga sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan pegunungan yang berhawa dingin. Akibatnya banyak di antara para guru tersebut yang tidak tahan dan kembali ke daerah asalnya. Selain itu pola pemukiman penduduk di wilayah yang berbukit-bukit dan jauhnya jarak dari rumah ke sekolah.

Namun demikian, banyak pula guru-guru yang sabar dan bertahan

tinggal di Desa Ngadisari dengan tekad menekankan betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dilibatkan para guru di LKMD yang bertugas membantu program pemerintah di bidang penerangan ke masyarakat. Berkat ketekunan dan kesabaran para guru tersebut banyak di antara orangtua yang kemudian mulai sadar betapa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anak-anaknya. Meskipun, sebagian besar penduduk yang bersekolah jarang yang melanjutkan ke perguruan tinggi dengan alasan tidak ada biaya atau kurang bervariasinya jenis pekerjaan yang ada sehingga tidak perlu memikirkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Di samping jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal telah berkembang baik di Desa Ngadisari. Pendidikan nonformal (kursus-kursus) tersebut diselenggarakan dengan bekerjasama antara para guru, pemerintah Desa Ngadisari, dan warga masyarakat sendiri. Beberapa pendidikan nonformal tersebut antara lain (1) Pendidikan kesenian (*karawitan*) bagi para anggota PKK; (2) pendidikan olah raga bola voli bagi para remaja; (3) Pendidikan kesejahteraan keluarga bagi para ibu rumah tangga; (4) Pendidikan kepramukaan; (5) Pendidikan kelompok belajar (kejar) paket A; (6) Penataran dan simulasi P-4; dan (7) Pendidikan keagamaan, khususnya agama Hindu Tengger.

Sebagian besar penduduk Desa Ngadisari membangun rumah dengan cara permanen (bangunan yang banyak dibangun di sepanjang jalan raya Bromo) jumlahnya ada 163 buah, rumah nonpermanen (bangunan yang menggunakan sebagian bahan padat sebagian dinding menggunakan bambu atau kayu) ada 190 buah, dan bangunan tidak permanen, seperti bangunan rumah sementara di lahan pertanian untuk tempat beristirahat ketika lelah bekerja jumlahnya tidak di data.

D. EKONOMI

Bertolak dari data Monografi desa 1995 diperoleh gambaran bahwa penduduk yang bekerja sebagai karyawan yang bekerja di terminal dan kantor pemerintah berjumlah 6 orang, penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta (pedagang atau *tengkulak* sayur mayur) berjumlah 20 orang, penduduk yang bekerja di bidang tani berjumlah 300.892 orang,

penduduk yang bekerja di bidang pertukangan (kayu dan batu) berjumlah 15 orang. Penduduk yang memilih profesi di bidang pariwisata (kuda sewa) berjumlah 225 orang (data 1995). Data terakhir (Maret, 1996) diperoleh keterangan bahwa penduduk yang mempunyai kuda sewa berjumlah 300 orang. Hal itu berarti hampir semua KK mempunyai kuda sewa yang tidak selalu dikelola sendiri, tetapi dikerjakan orang lain dengan perhitungan biaya sewa dari Cemoro Lawang - Bromo pp sebesar Rp 10.000,00. Dipotong untuk retribusi desa yang dikordinasi oleh Paguyuban Kuda Sewa sebesar Rp 500,00 sekali jalan. Dipotong untuk orang yang mengerjakan kuda sewa sebesar Rp 3.000,00, dipotong untuk makanan kuda sebesar Rp 3.000,00. Dipotong untuk makanan tambahan (katul, *bretes*) sebesar Rp 1.000,00, sisa bersih untuk pemilik sekali jalan pp Rp 2.000,00. Harga kuda relatif mahal. Harga satu kuda antara Rp 2.000.000,00 sampai Rp 2.500.000,00. Usia kuda sewa antara 10-15 tahun. Kuda-kuda tersebut dibeli dari pedagang (*tengkulak*) dari Jawa (Pandaan, Pasuruan, atau Malang) yang membelinya dari pulau Sabu. Berdasarkan hal di atas, diketahui bahwa penduduk Desa Ngadisari mayoritas bekerja sebagai petani dan matapencaharian sambilan dengan menyewakan kuda untuk wisatawan. Kedua potensi tersebut yang membuat keadaan ekonomi penduduk Desa Ngadisari mengalami peningkatan. Data tahun 1991 diperoleh keterangan bahwa **inkam perkapita** penduduk sebesar Rp 2.000,00. Pada tahun 1996, inkam penduduk menurut Kepala Desa Ngadisari mengalami peningkatan menjadi Rp 5.000,00. Penduduk Ngadisari yang telah memperoleh pendidikan nonformal di bidang pemandu wisata berjumlah 8 orang. Keseluruhan pemandu tersebut belum dikordinasi dengan baik sehingga mereka bekerja sendiri-sendiri di Kuda Sewa atau Angkutan Jeep tanpa tarif resmi yang jelas. Menurut Kepala Desa Ngadisari, Sapawi, pemandu wisata dari luar perlu ditertibkan karena sering memasang tarif yang sangat tinggi sehingga sering mematikan pendapatan pemandu Kuda Sewa yang hanya memperoleh hasil Rp 2.000,00 dari Cemoro Lawang-Bromo pp.

Dalam uraian sebelumnya diketahui bahwa mayoritas matapencaharian penduduk adalah bertani. Hasil pertanian yang utama Desa Ngadisari adalah sayur mayur. Jenis tumbuh-tumbuhan yang mereka

tanam adalah padi, palawija, kentang, kubis (kol), wortel, dan bawang prei. Hasil panen padi dan palawija dengan luas lahan 8 ha jumlah produksinya bisa mencapai 54 ton. Sedangkan hasil produksi sayur mayur dengan luas lahan 96 ha pada tahun 1995 mencapai sekitar 857 ton.

Di samping itu, mereka juga masih menanam jagung. Tanaman ini merupakan tanaman pokok masyarakat Desa Ngadisari sebelum tahun 1970-an, sekarang sudah diganti dengan tanaman sayur mayur yang dijual sendiri oleh para petani ke luar daerah, seperti Semarang, dan daerah lain di Jawa Tengah atau melalui *tengkulak* (warga desa Ngadisari) yang menjualnya ke kota kabupaten Probolinggo atau ke luar kabupaten Probolinggo.

Usaha sampingan penduduk, selain dari menjual sayur mayur dan pariwisata, juga diperoleh dari hasil penjualan *rojokoyo*, seperti penjualan ternak. Beragam macam hewan yang ditenakan antara lain adalah sapi, itik, kambing, domba, ayam kampung, ayam ras, kuda dan angsa. Jumlah binatang ternak seluruhnya sekitar 1.152 ekor. Namun ayam kampung paling banyak dipelihara oleh penduduk karena proses perawatannya sangat mudah, walaupun tidak diberi makan, ayam-ayam tersebut kebanyakan dilepas mencari makan sendiri, sedangkan sapi dan kambing dipelihara di kandang yang ditempatkan di belakang rumah, kadang-kadang dilepas di ladang mereka. Penduduk Desa Ngadisari tidak pernah kehilangan ternak. Berdasarkan data dari Polsek Sukapura, wilayah Desa Ngadisari relatif aman, tidak pernah ada pencurian ternak.

Tanaman yang dikenal paling awet dan laku di pasaran ialah tanaman kol (kubis), kentang, dan bawang prei. Tanaman kol dapat tahan lebih lama dari kol daerah lain. Demikian pula dengan tanaman bawang prei dan kentang. Hal ini disebabkan kondisi tanah dan iklim daerah pegunungan Tengger sangat cocok dengan tanaman tersebut.

Sarana perekonomian lain yang menunjang kehidupan masyarakat antara lain adalah adanya rumah makan, toko-toko souvenir yang berjumlah 12 buah, hotel satu buah, rumah makan 2 buah, warung 10 buah, dan jasa angkutan jeep berjumlah 40 buah. Pada masa kini, toko-toko souvenir di Terminal Ngadisari tidak digunakan lagi karena sudah

pindah dekat Taman Wisata Bromo (Gambar 8). Demikian pula dengan rumah makan yang berada di pinggir jalan raya Bromo dekat pintu masuk jalan Bromo jarang sekali dikunjungi tamu. Demikian pula dengan jeep-jeep toyota yang disewakan untuk wisatawan, beberapa di antaranya (lebih kurang 5 buah) sudah dialihfungsikan untuk angkutan hasil-hasil pertanian.

Homestay yang jumlahnya 40 buah pada saat ini "mati segan, hidup tak mau." Hal ini terjadi karena hotel-hotel yang dibangun di dekat Taman Wisata Bromo juga membuka tarif ekonomi sebesar Rp 10.000,00 semalam sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat dengan pemilik *homestay* (rumah sewa) yang menyewakan kamarnya Rp 15.000 semalam dan makan tiga kali Rp 5.000,00. Dengan demikian, penghasilan dari pemilik *homestay* yang kebanyakan adalah penduduk Desa Ngadisari pada saat ini sangat memprihatinkan. *Homestay-homestay* tersebut yang masih aktif tinggal 17 buah. Tamu yang menginap di *homestay* umumnya adalah peneliti atau wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat masyarakat Tengger dalam kehidupan sehari-hari (Gambar 9).

Jumlah proyek di Desa Ngadisari yang dibiayai oleh swadaya masyarakat ada 4 buah dengan nilai Rp 39.465.000,00, Proyek pemerintah Daerah Tingkat I berjumlah 1 buah dengan nilai Rp 1.500.000,00. Proyek yang memperoleh bantuan Presiden ada 2 buah dengan nilai Rp 6.000.000,00

E. AGAMA, ADAT DAN KEPERCAYAAN

Sebelum tahun 1973, warga masyarakat Tengger menyebut agamanya adalah agama *Budo*. Agama *Budo* di sini berbeda dengan agama *Buddha* (**Sidharta Gautama**) yang diakui oleh Undang-Undang pasal 29 mengenai 5 agama besar di Indonesia, tetapi agama *Budo* yang dianut orang Tengger ialah agama yang dianut oleh nenek moyang mereka yang berasal dari Majapahit. Mereka sangat patuh melaksanakan upacara *Kasada*, upacara *Karo*, *Entas-Entas*, dan *Unan-Unan* yang merupakan warisan dari tradisi lama. Sejak tahun 1973, berdasarkan ketetapan dari **Parisada Jawa Timur**, masyarakat Tengger digolongkan menjadi pemeluk agama *Buddha Mahayana* dengan surat keputusan No.00/PHB

Jatim/Kept/III/73 tertanggal 6 Maret 1973. Namun demikian, dalam melaksanakan ritual keagamaan, orang Tengger jarang menggunakan simbolisasi agama Buddha, kecuali kata *Hong* yang biasa dipakai oleh umat beragama Buddha.

Tempat ibadat orang Tengger disebut *Sanggar Pamujan* atau melakukan persembahyangan di rumah masing-masing. Setelah ada pembinaan dari **Parisada Hindu Dharma**, didirikanlah **pura** (*poten*), tempat pemujaan yang tipologi bangunannya sangat mirip dengan pura-pura di Bali. *Poten* ini dibangun di Lautan Pasir di sebelah Barat Gunung Bromo yang dibangun oleh Dinas Pariwisata Jawa Timur dan Parisada Hindu Dharma dan baru selesai pembangunannya tahun 1994. Sampai saat ini, *poten* digunakan sebagai pusat peribadatan masyarakat Tengger, terutama pada waktu upacara Kasada.

Agama masyarakat Tengger dilihat dari segi ajaran dan ritual upacara terkandung unsur ajaran agama Buddha Mahayana, Hindu Dharma, dan kepercayaan tradisi yang diwarisi dari masa nenek moyang dulu. Agar masyarakat Tengger memperoleh keyakinan yang utuh tentang agama dan kepercayaannya, pada tahun 1973 itu pula diadakan musyawarah di Balai Desa Ngadisari dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dari pertemuan tersebut diputuskan bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Tengger ialah Hindu Dharma, dan tetap melestarikan pengucapan kata *Hong*, seperti yang diucapkan pertama kali apabila *dukun* membacakan mantra. Ucapan salam orang Tengger ialah *Hong ulun basuki langgeng* yang berarti **Semoga Tuhan tetap memberikan keselamatan atau kemakmuran yang kekal abadi kepada kita** (Simanhadi Wydiaprakasa, 1994:44).

Sebelum dilakukan pembinaan tahun 1973, masyarakat menamakan Tuhan yang mereka sembah ialah *Gusti* atau *Gusti Ingkang Maha Agung*. Sejak dilakukan pembinaan tahun 1973 oleh **Parisada Hindu Dharma** menggunakan salam agama Hindu yakni *Om Swastiastu*.

Dasar keimanan agama Hindu adalah *Panca Srada* yaitu (1) Percaya kepada **Sang Hyang Widhi Wasa**, Tuhan pencipta alam semesta; (2) Percaya adanya *Atman* yaitu roh leluhur atau rohnya sendiri; (3)

Percaya adanya *karmapala* yaitu hukum sebab akibat. Kepercayaan pada *karmapala* ini merupakan inti ajaran agama Hindu maupun agama Budha. Semua perbuatan manusia itu pasti terikat pada hukum sebab akibat. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya, baik sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang; (4) Percaya pada *punarbawa* (**reinkarnasi**). Kepercayaan ini adalah dari agama Hindu dan Buddha. Manusia terikat pada hukum hidup berkali-kali sesuai dengan *dharma* atau *adharma* ketika masih hidup di dunia; dan (5) Percaya pada *moksa* (**sirna**). Apabila manusia telah mencapai moksa tidak akan terikat kembali pada *punarbawa*. Tempat kehidupan yang damai dan abadi.

Pemimpin persembahyangan umat Hindu di Tengger disebut Pinandita. Kedudukan *pinandita* berada di atas dukun, terutama pada saat melakukan persembahyangan di *poten*. *Dukun* adalah pemimpin setiap upacara yang diwariskan secara turun temurun. Kedudukan lebih tinggi dari modin dalam agama Islam. Dukun di Tengger dikepalai oleh seorang *kepala dukun*.

Dukun mempunyai kedudukan penting di bidang keagamaan. Dukun Tengger berbeda dengan dukun-dukun lain di Jawa atau di luar Jawa. Dukun di Tengger lebih tinggi dari *modin* (Islam) lebih rendah dari *pinandita* (Hindu). Dukun Tengger jumlahnya ada 36 orang (Simanhadi Wydiaprakosa, 1994). Pada saat upacara Kasada, para dukun itu diketuai oleh seorang *kepala dukun*. Ketua dukun dibantu oleh pembantu dukun yang bernama *Tiyang Sepuh* yang bertugas membantu dukun dalam segala upacara. *Tiyang Sepuh* dalam bahasa setempat artinya orang tua yang usianya belum tentu lanjut tetapi dituakan secara keagamaan. Pada masa lampau, *Tiyang Sepuh* dipilih oleh *Petinggi* (**Kepala Desa**). Pada saat sekarang, *Tiyang Sepuh* dipilih oleh **Kepala Dukun** atau **Kepala Adat**. Pembantu Ketua Dukun yang lain ialah *Dan-dan* yakni seorang perempuan tua yang tugasnya membantu dukun di samping *Tiyang Sepuh*. Tugasnya ialah memeriksa kelengkapan sajian sebelum dimanterai oleh Ketua Dukun. Ia harus paham tentang jenis sajian yang diperlukan untuk suatu upacara. Pembantu *kepala dukun* lainnya adalah *Legen* yang bertugas melayani dukun mengambilkan peralatan dukun, membuat api pedupaan, dan tidak perlu menghafal

mantera. *Legen* pada saat upacara biasanya duduk di belakang *ketua dukun* di sebelah kiri. *Legen* dipilih oleh *Kepala Dukun* dengan tidak menentukan batas usia, tetapi ia harus berjenis kelamin laki-laki.

Semua warga masyarakat Tengger bisa menjadi dukun setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Setiap bulan *kapitu* dukun dan perangkatnya harus melakukan *megeng* dan *mutih*. *Megeng* atau *patigeni* dilakukan pada awal *kapitu* dan akhir bulan *kapitu*. Dalam acara *megeng* ini, selama satu hari satu malam, dukun dan perangkatnya tidak boleh makan, tidak tidur, dan tidak bicara serta tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Untuk menghindari adanya gangguan yang tidak diinginkan, dukun menempuh beberapa cara di antaranya melakukan *patigeni* di *punden* atau *sanggar pamujan*, di kamar khusus, dan cara *ngalas* yakni pergi ke tengah hutan dan melakukan *semedi* di hutan. Setelah itu, baru dukun melakukan kegiatan *mutih* selama satu bulan penuh. Dalam kegiatan *mutih* ini, dukun tidak diperkenankan makan makanan yang manis dan asin sehingga dukun dalam bulan *kapitu* ini hanya makan nasi putih. Selain itu, selama *mutih*, dukun tidak diperkenankan berkumpul dengan istri. Menurut pak Sujai tujuannya untuk membersihkan diri dan *ngasah pusoko* termasuk mengasah mantera-mantera. Selama bulan *kapitu* ini, masyarakat Tengger yang meninggal dunia, jasadnya dikebumikan terlebih dulu sedangkan upacara dan selamat ditunda pada bulan-bulan berikutnya. Setelah kegiatan *megeng* dan *mutih* dilaksanakan, masyarakat bergotong royong dengan membayar iuran untuk melakukan upacara *pujanko wolu*, tepatnya dilakukan pada tanggal 1 bulan *kawolu* penanggalan Tengger. Upacara ini diselenggarakan di pendopo desa dipimpin oleh *kepala dukun*.

Syarat lain untuk menjadi dukun, idealnya ialah keturunan dari dukun terdahulu. Pak Sujai (*Kepala Dukun*) adalah keturunan ke sembilan dari dukun pertama yakni mbah **Surandaka**. Tokoh ini dianggap pahlawan oleh masyarakat karena berhasil membunuh penguasa Cina yang bergelar Kapten dan mengeksploitasi masyarakat Probolinggo pada abad XVIII (F.A. Sutjipto, 1982:367). Setelah **Surandaka** berhasil

membunuh **Kapten Han Ti Ko**, Surandaka mukso, artinya meninggal tanpa diketahui jasadnya. Jika yang menjadi dukun bukan keturunan dukun, tidak akan lama menjalankan tugas sebagai dukun.

Syarat untuk menjadi dukun juga harus dapat menghafal 600 mantera yang manfaatnya untuk berbagai upacara adat. Untuk menghafal mantera yang sangat banyak itu memerlukan ketekunan dan proses yang panjang. Pada waktu mempelajari mantera, ia kurang tidur dan kurang makan. Setelah hampir menghafal seluruh mantera, ia harus berpuasa 20 hari.

Menurut pak Sujai, pada tahun 1967 dia dipilih oleh warga masyarakat Desa Ngadisari untuk menjadi dukun. Pada waktu itu ia masih belum mampu menghafalkan seluruh mantera, maka yang memimpin upacara adat di desanya adalah dukun yang paling dekat dari desa itu (**Wonotoro**). Setelah belajar mantera-mantera, tidak dengan sendirinya orang tersebut menjadi dukun. Ia harus diuji oleh seluruh dukun yang ada di kawasan Tengger pada waktu upacara Kasodo. Pengujian dukun baru ini dikenal dengan istilah *mulunen*. Setelah itu seseorang bisa menjadi dukun setelah menjalankan upacara menemukan *manten* 7 kali. Apabila masih belum, ia tidak boleh memimpin upacara adat, kendatipun dia sudah lulus *mulunen* pada upacara Kasodo.

Seorang dukun harus memiliki kepribadian yang baik, jernih, tidak memiliki rasa iri hati, jujur, dan tidak boleh mengganggu istri orang lain sehingga ia disegani oleh masyarakat. Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar dampaknya pada masyarakat yakni biasanya masyarakat seringkali mengalami malapetaka. Selain itu seorang dukun harus berjenis kelamin laki-laki dan sudah berkeluarga. Apabila dukun tidak mempunyai anak biasanya pewarisnya adalah keluarga dekat.

Orang Tengger percaya akan adanya roh-roh halus dan arwah orang yang telah meninggal dunia yang diyakini masih hidup. Roh-roh atau makhluk halus tersebut dipersonifikasi sebagai *danyang* penunggu desa. *Danyang-danyang* tersebut dihormati dan diberi sesajen agar tidak marah. Tempat penghormatan terhadap para *dayang* adalah *sanggar pandhayangan* atau *punden*. Pohon-pohon besar atau tempat-tempat lain yang dianggap keramat bisa pula disebut sebagai *pundhen*.

Berkenaan dengan kepercayaannya, masyarakat Tengger pada umumnya dan penduduk Desa Ngadisari pada khususnya wajib melakukan upacara-pacara yang diadakan pada bulan-bulan tertentu. Dalam satu tahun mereka mengenal 12 bulan, yaitu bulan *Kasa*, *Karo*, *Tiga*, *Kapat*, *Kalimo*, *Kanem*, *Kapitu*, *Kawolu*, *Kasongo*, *Kasepuluh*, *Kadesta*, dan *Kasada*. Sedangkan hari-hari pasaran yang mereka kenal adalah *Petakan (Legi)*, *Abritan (Pahing)*, *Jene (Pon)*, *Cemengan (Wage)*, *Manca Warna (Kliwon)*. Hari-hari yang mereka kenal dalam satu minggu adalah *Dite*, *Soma*, *Anggara*, *Respati*, *Sukro*, dan *Tumpuk*.

Berbagai upacara yang dilakukan adalah:

1. Upacara *Kasada*

Upacara ini merupakan upacara korban dan diselenggarakan setahun sekali pada bulan *Kasodo* dan dilakukan di *Poten* yang berada di Lautan Pasir sebelah Barat Gunung Bromo, tempat bersemayamnya Dewa Bromo yang menjadi pelindung orang Tengger. Upacara *Kasodo* ini berkaitan erat dengan asal usul nama Tengger. Kata Tengger diambil dari nama *Roro Anteng* dan *Joko Seger* (seorang anak bangsawan dan seorang anak Begawan (*Resi Dadap Putih*) yang menjalin tali perkawinan.

Perkawinan tersebut telah berlangsung lama tetapi belum menghasilkan keturunan seorang pun. Di dalam usahanya mendapatkan keturunan, *Joko Seger* dan *Roro Anteng* bertapa memohon kepada dewa yang menghuni gunung Bromo. Di hadapan dewa penunggu gunung Bromo tersebut, pasangan suami istri mendengar *wisik* akan diberikan keturunan dengan syarat kelak jika anaknya berjumlah 25 orang dan semuanya hidup, maka anak yang paling kecil atau bungsu akan dikorbankan ke kawah Bromo sebagai tanda ucapan terima kasih. Akhirnya benar juga bahwa anak bungsu *Roro Anteng* dan *Joko Seger* yang diberi nama *Raden Kusumo*, meskipun disembunyikan oleh *Joko Seger* dan *Roro Anteng*, tetap menjadi korban gunung Bromo. Dari dalam kawah kemudian terdengar agar untuk mengingat pengorbanan *Raden Kusumo* dan memperoleh keselamatan dan berhasil di bidang pertanian,

penduduk Tengger harus mengorbankan hasil buminya kepada dewa penunggu gunung Bromo. Sejak saat itu, setiap tanggal **15 bulan Kasodo**, saat bulan Purnama Sidi orang Tengger melakukan upacara korban ke kawah gunung Bromo berupa hasil bumi dan hewan tertentu.

2. Upacara *Karo*

Upacara *Karo* merupakan upacara yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan *Karo* dan merupakan upacara terbesar setelah Upacara *Kasada*. Upacara ini bertujuan untuk menghormati arwah leluhur orang Tengger. Penyelenggaraan upacara *Karo* berlangsung selama dua minggu dan dipusatkan di daerah pedesaan. Permainan sodoran diadakan sebagai pelengkap upacara *Karo*, yaitu seni permainan *sodoran* yang bersifat seni tradisional yang dilakukan oleh 4 orang yang membentuk formasi saling berhadapan.

Inti dari upacara *Karo* ini pada dasarnya adalah dikeluarkannya jimat *Klontongan Ontokusuma*. Pada saat ini juga dipertunjukkan seni tradisional *Ujungan* yang dilakukan sebagai penutup upacara *Karo*. *Ujungan* adalah sebuah permainan saling mencambuk satu lawan satu masing-masing membawa cambuk rotan. Dalam permainan tersebut setiap pemain berusaha saling mencambuk lawannya yang merupakan simbol persaudaraan dan persatuan masyarakat Tengger dalam suka dan duka.

Upacara adat yang lain yaitu: (1) *Unan-unan*, upacara ini dilakukan setiap 5 tahun sekali dipusatkan di pedesaan, bertujuan untuk menghormati leluhur dan dewa-dewa upacara; (2) *Barikan*, bertujuan untuk menghibur dan mendapatkan hari baik para jin setan dan menjauhkan diri dari segala penyakit; (3) *Pujan*, bertujuan untuk memuliakan asal usul manusia dan diadakan setiap 4 tahun sekali; (4) *Tugil Kuncung*, upacara ini bersifat khusus bertujuan membudhakan seorang anak yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun, dan (5) Upacara adat *Nglukat* atau disebut juga *entas-entas*, bertujuan untuk mengentaskan atau mengeluarkan arwah dari tempat yang belum sempurna (siksaan)

ke surga (tempat sempurna). Jadi upacara entas-entas ini ada hubungannya dengan kematian. Upacara ini merupakan rangkaian terakhir dari upacara kematian. Entas-entas biasanya dilakukan secara gotong royong oleh beberapa keluarga untuk menghemat biaya.

Di samping adanya kepercayaan terhadap para roh leluhur, arwah orang yang sudah meninggal, tempat-tempat keramat dan para leluhur, masyarakat Desa Ngadisari juga mengenal adanya agama. Agama yang mereka anut ialah agama *Budha Tengger*. Berdasarkan Surat Keputusan Parisada Hindu Dharma Propinsi Jawa Timur tanggal 6 maret 1973 No.00/PHD. Jatim/Kept./III/73, agama yang dianut orang Tengger di Kabupaten tetap menyebut dirinya penganut Hindu Dharma. Tuhan disebut dengan istilah **Sang Hyang Agung** atau **Yang Maha Agung**. Sang Hyang Agung dipercaya sebagai pencipta alam semesta. Kitab agamanya disebut *primbon* yang ditulis di atas daun lontar dengan bahasa Jawa Kuno dan Syansekerta. Kitab ini harus dimiliki oleh dukun/pemangku dan tidak boleh dimiliki oleh orang sembarangan.

Di samping agama Hindu, sebagian kecil lainnya ada yang memeluk agama Islam atau Katolik. Majelis Hindu ada 1 kelompok (**Majelis Parisada Hindu Dharma**) dan Kelompok Remaja Hindu ada 2 buah berjumlah 70 orang, yakni *Sanggar Pamujan* dan *Sanggar Agung*. Kehidupan beragama di Desa Ngadisari berjalan baik dan saling menghormati agama lain.

Tempat ibadat orang Tengger dilakukan di *Sanggar Pamujan*. Sanggar ini dibuat di dalam rumah penduduk. *Sanggar Pundhen* ialah sanggar tempat roh-roh leluhur yang dikeliling oleh pohon-pohon tinggi dan semak belukar. Waktu beribadat dilakukan pada pagi hari menjelang matahari terbit, siang hari pada saat matahari berada di atas kepala dan senja hari pada saat matahari terbenam. Pakaian yang dikenakan dalam peribadatan di sanggar adalah pakaian adat Tengger.

F. SOSIAL

Dalam pergaulan hidup sehari-hari tampak adanya sikap saling menghargai satu sama lain. Mereka percaya adanya hukum *karma*. Oleh

karena itu, satu sama lain senantiasa berbuat baik, tidak menyakiti, dan setiap ada masalah mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah, landasannya adalah *welas asih pepitu* (cinta kasih yang tujuh), yaitu: (1) *Welas asih marang Bapa Kuasa* (Tuhan); (2) *Welas asih marang Ibu Pertiwi* (negara dan tanah air); (3) *Welas asih marang Bapa Biyung* (Orang Tua); (4) *Welas asih marang rasa jiwa* (rasa jiwa); (5) *Welas asih marang sepadane urip* (sesama hidup); (6) *Welas asih marang sato kewan* (binatang); dan (7) *Welas asih marang tandur tetuwuh* (tumbuh-tumbuhan).

Di samping ajaran-ajaran mengenai *welas asih pepitu*, masyarakat juga mengenal adanya beberapa pantangan untuk menjaga keserasian hubungan kemasyarakatan. Pantangan tersebut antara lain adalah tidak boleh menyakiti atau membunuh binatang kecuali binatang korban atau dimakan, tidak boleh berbuat jahat, tidak mencuri, tidak boleh berdusta, tidak boleh minum-minuman yang memabukkan. Sebaliknya ada beberapa hal yang dianjurkan kepada masyarakat yaitu berpikiran benar, berkata benar, dan berbuat benar dan menjalankan kepercayaan yang benar.

Pantangan dan anjuran tersebut dicanangkan agar masyarakat bisa berlaku sesuai dengan peranan yang dimiliki dan status yang dipunyai sehingga mereka bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Di samping pantangan dan anjuran tadi, dikenal pula adanya 20 wasiat yang harus diingat dan dikerjakan. Kedua puluh wasiat tersebut adalah: (1) Sebaiknya orang hidup itu mempunyai budi pekerja yang baik; (2) Hendaknya orang bisa mencegah makan yang mewah, tetapi sederhana saja; (3) Hendaknya orang bisa mencegah rasa kantuk sehingga waktu untuk tidur tidak berlebihan; (4) Hendaknya orang itu bersifat sabar, bisa mengendalikan diri; (5) Setiap orang diharapkan wajib dan melaksanakan ajaran Tuhan; (6) Agar setiap orang bersyukur pada **Sang Hyang Agung**; (7) Hendaknya orang saling menolong, lebih-lebih pada orang yang sedang tertimpa kesusahan; (9) Setiap orang diharapkan suka memberi makan pada mereka yang kelaparan; (10) Orang wajib memberi payung pada mereka yang kehujanan; (11) Orang wajib memberi tudung pada mereka yang kepanasan; (12) Orang wajib memberi minum pada

mereka yang kehausan; (13) Orang hendaknya memberikan tongkat kepada mereka yang tergelincir; (14) Hendaknya orang itu menunjukkan jalan kepada orang lain yang sedang tersesat; (15) Diharapkan orang saling mengingatkan apabila ada di antara mereka yang lupa; (16) Setiap orang harus mau memaklumi perbuatan orang yang salah sehingga orang tersebut menjadi sadar dan lemah; (17) Hendaknya setiap orang bersikap ramah terhadap tamu; (18) Hendaknya orang saling memaafkan, dan (19) Sebaiknya orang tidak sok, merasa diri paling benar, paling pintar atau paling kaya. Semua itu adalah milik Tuhan, Sang Hyang Agung.

Berdasarkan ajaran *welas asih pepitu*, *panca sroda* dan 20 wasiat yang terkandung unsur yang menekankan agar masyarakat Ngadisari senantiasa berbuat baik terhadap sesama manusia maupun terhadap makhluk hidup lainnya sesama ciptaan Tuhan. Semua pesan dalam ajaran-ajaran tersebut diharapkan tertanam dalam diri setiap individu sebagai anggota masyarakat, diyakini kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Tengger yang tinggal di Desa Ngadisari.

Di samping adanya beberapa ajaran yang berlaku baik dalam kehidupan masyarakat terdapat pula jenis pengendalian sosial (*social control*). Pengendalian sosial di sini berfungsi sebagai pencegah timbulnya suatu perbuatan yang menyeleweng atau melanggar aturan-aturan yang berlaku. Wujud dari pada pengendalian sosial itu adalah adat istiadat itu sendiri.

Bertolak dari adat istiadat yang dipedomani oleh masyarakat Ngadisari, juga ketaatan mereka menjalankan atau melaksanakan upacara-upacara berkenaan dengan adat istiadat tersebut menunjukkan betapa taqwanya mereka terhadap Sang Hyang Agung. Dari sekian banyak upacara yang mereka lakukan, dua diantaranya yang terbesar adalah upacara Karo dan Kasodo.

Hal-hal yang disebutkan di atas menyebabkan terciptanya suatu kehidupan kemasyarakatan yang aman, tentram dan damai sehingga warga masyarakat bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya.

Keamanan lingkungan tersebut didukung pula oleh adanya rasa kebersamaan yang tinggi di antara penduduk di Ngadisari. Salah satu bentuk kebersamaan tersebut adalah tidak adanya rasa penonjolan diri dalam kehidupan mereka, mereka saling menghormati, saling menghargai di antara pemeluk agama yang berbeda dan mereka juga melaksanakan upacara adat bersama.

BAB III

PEMERINTAHAN TRADISIONAL

A. STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

Nama-nama kepala desa (*petinggi*) yang pernah dan sedang menjadi pejabat Kepala Desa Ngadisari terdiri dari: Rasjid, Kepala Desa I (tidak diketahui masa baktinya); Kewer, Kepala Desa II (tidak diketahui masa baktinya); Gembek, Kepala Desa III (awal - sampai 1896); Niman, Kepala Desa IV (1896 - 1932); Sabin, Kepala Desa V (1932 - 1948); Alip, Kepala Desa VI (1948 - 1949); Sampur, Kepala Desa VII (1949 - 1965); Kernadi, Kepala Desa VIII (1965 - 1966 Karteker); Sukartjo, Kepala Desa IX (1967 - 1987); Iman Slamet, Kepala Desa X (1987 - 1988 Pjs); Sapawi, Kepala Desa XI (jabatan tersebut diemban dari tahun 1988 hingga sekarang). (Gambar 10).

Struktur Organisasi Pemerintahan dan Perangkat Desa Ngadisari periode 1988 - 1996 adalah sebagai berikut: Kepala Desa : Sapawi; Sekretaris Desa : Supopy merangkap Kaur Pemerintahan; Kepala Urusan Pemerintahan : Supoyo; Kepala Urusan Pembangunan : Hartono; Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat : Wirnomo; Kepala Urusan Keuangan : Ngasmanan; Kepala Urusan Umum : Umai; Kepala Dusun Wanasari : Marjoko; Kepala Dusun Ngadisari : Rantai; dan Kepala

Dusun Cemoro Lawang : Sumartono. (Bagan 1).

Kendala pada awal ketika Pak Sapawi menjabat sebagai kepala desa yang baru ialah melengkapi personil yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Berkat kesabaran, ketekunan, dan kerja keras pak Sapawi, hanya jabatan Sekretaris Desa yang belum ada sampai saat ini. Sehingga jabatan tersebut kemudian dirangkap oleh Kepala Urusan Pemerintahan, Bapak Supoyo. Menurut keterangan, upaya mengisi jabatan Sekretaris Desa sudah diumumkan sampai 3 kali, tetapi tidak ada satu pun warga masyarakat yang berminat untuk menjadi sekretaris desa. Salah satu alasan warga ialah hasil yang diperoleh sebagai sekretaris desa lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari hasil penjualan palawija, sayur mayur, atau *rojokoyo*.

Pak Sapawi menyadari ketika dirinya dicalonkan sebagai calon tunggal sebagai Kepala Desa Ngadisari tahun 1988, ada beberapa warga mengisi kotak kosong yang menurut Pak Sapawi orang-orang tersebut ingin menabur duri. Namun, pak Sapawi berprinsip akan tetap menabur bunga. Dengan demikian, meskipun ia banyak menghadapi kesulitan, ia akan menikmati hasilnya di alam baqa. Hal ini merupakan suatu sikap keimanan akan ajaran *karmapala*. Menurut pak Sapawi jika ada orang yang tidak setuju, orang sini jarang yang mau bicara di depan, di belakang kemudian membuat intrik.

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan dalam adalah membantu Sekretaris Desa atau Sekretaris Kelurahan. Adapun tugas dan fungsi Kaur Pemerintahan yaitu: (1) melaksanakan kegiatan administrasi penduduk; (2) melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan kartu tanda penduduk (KTP); (3) melaksanakan kegiatan administrasi kewarganegaraan; (4) melaksanakan pencatatan kegiatan administrasi pertanahan; (5) melaksanakan pencatatan pembuatan monografi; (6) melaksanakan pencatatan kegiatan kemasyarakatan antara lain RW, RT, dan kegiatan Katramtib pertahanan sipil; (7) melaksanakan penyelenggaraan Buku Administrasi keputusan desa dan keputusan kepala desa; (8) menyusun rencana keuangan; (9) melaksanakan kegiatan administrasi PEMILU berdasarkan ketentuan yang berlaku; (10) mencatat kegiatan sosial politik; dan (11)

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa atau sekretaris Kelurahan.

Buku yang menjadi tanggung jawab Kaur Pemerintahan berjumlah 15 buah yaitu: (1) Buku Keputusan Desa Model C-1; (2) Buku keputusan desa model C-2; (3) Daftar bagi hasil di tingkat desa atau kelurahan model 4; (4) Register RW model 8C; (5) Buku personil Hansip/wanra model 9A; (6) Buku register permohonan bersih diri/adat istiadat model 9B; (7) Inventaris bromo corah model 9D; (8) Register kejahatan/pelanggaran model 9E; (9) Register tanah model 4A; (10) Daftar peralihan hak tanah model 6D; (11) Daftar luas penggunaan status dan jumlah pemegang hak tanah model 4; (12) Daftar penguasaan dan pengusahaan tanah desa model 4B; (13) Buku tanah di desa/kelurahan model C4; (14) Buku induk model A7; dan (15) Buku mutasi model A8.

Tugas dan Fungsi Kaur Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari: (1) melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan; (2) melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan; (3) menghimpun data potensi serta menganalisis dan memelihara untuk dikembangkan; (4) melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan Daftar Usulan Proyek/Daftar Usulan Kegiatan serta mencatat Daftar Isian Proyek/Daftar Isian Kegiatan; (5) mengikuti dan melaporkan kegiatan perekonomian, perkoperasian, perkreditan, dan lembaga perekonomian lainnya; (6) mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan kegiatan di bidang pertanian perindustrian maupun pembangunan lain; (7) melaksanakan pencatatan tera ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain; dan (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa atau sekretaris kelurahan.

Buku yang menjadi tanggung jawab Kaur Pembangunan berjumlah 15 buah yaitu: (1) Register pertanian model 5; (2) Register ternak besar model 6A; (3) Daftar jiwa ternak besar model 6B; (4) Register transaksi rojokoyo model 6G; (5) Register potong hewan model 6H; (6) Buku bangunan model 8E; (7) Daftar radio dan Televisi dan sebagainya model 8H; (8) Daftar perusahaan model 8F; (9) Daftar kendaraan model 8G; (10) Register perikanan darat model 7A; (11)

Register perikanan laut model 7B; (12) Daftar banyaknya unggas/ternak lain model 6F; (13) Daftar unggas model 6C; (14) Daftar banyaknya ternak kecil model 6E; (15) dan Daftar ternak kecil model 6B.

Tugas dan fungsi Kaur Kesra terdiri dari: (1) melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan masyarakat, termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olah raga, pemuda, dan PMI; (2) menyelenggarakan inventarisasi penduduk tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat, baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas para pidana; (3) mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat, PKK, dan kegiatan lainnya; (4) mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup; (5) melaksanakan kegiatan pencatatan bagi para peserta jemaah haji, melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, NTCR, kegiatan badan amil zakat, dan melaksanakan pengurusan desa/kelurahan; dan (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa/ sekretaris kelurahan.

Buku yang menjadi tanggung jawab Kaur Kesra berjumlah 7 buah yaitu: (1) Daftar pendidikan model 8A; (2) Register lembaga-lembaga sosial dan orang-orang terkemuka model 8B; (3) Data sosial model 8D; (4) Register Haji Model 10A; (5) Register nikah model 10B; (6) Daftar talak model 10C; dan (7) Register rujuk model 10D.

Tugas dan fungsi Kaur Keuangan meliputi: (1) melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa; (2) kepala kelurahan dan perangkatnya; mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan yang baru untuk dikembangkan; (3) melakukan kegiatan administrasi keuangan; dan (4) melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa atau sekretaris kelurahan.

Buku yang menjadi tanggung jawab Kaur Keuangan berjumlah 4 buah yaitu: (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) model B-1; (2) Buku Kas Umum model B-2; (3) Buku Kas

Pembantu model B-3; dan (4) Register Wesel dan paket model 2-C.

Tugas dan fungsi dari Kaur Umum meliputi: (1) melaksanakan, menerima, dan mengendalikan surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan; (2) mengkoordinasikan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah-naskah lainnya; (3) melaksanaiakan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; (4) menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket; (5) melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa atau kelurahan; (6) menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; (7) melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum; (8) mencatat inventarisasi kekayaan; (9) melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan ke rumah tangga pada umumnya; dan (10) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa atau sekretaris kelurahan.

Buku yang menjadi tanggung jawab Kaur Umum berjumlah 7 buah yaitu: (1) Buku kekayaan desa model C 3A; (2) Buku ekspedisi model C-5; (3) Buku aparat pemerintah desa dan kelurahan model C-6; (4) Buku tamu model 1D; (5) Buku cuti perangkat desa model 3B; (6) Buku agenda model 4C; dan (7) Register izin keramaian model 9C.

Upaya penerapan disiplin para aparat pemerintahan Desa Ngadisari salah satunya adalah dengan cara meletakkan lembaran tugas dan fungsi diatas meja masing-masing sesuai dengan jabatan yang diembannya. Disiplin para aparat desa juga terwujud dalam ketaatan menjalankan tugas. Seperti piket yang ditentukan berdasarkan hari pasaran, yaitu pasaran legi, pahing, pon, wage dan kliwon.

Adapun jadwal Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Tahunan Pemerintahan Desa di Jawa Timur berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juni 1992, No. 441.6/11919/013/1992. Jadwal tersebut berisikan keterangan kegiatan dari bulan April sampai bulan Maret sesuai dengan kegiatan satu tahun anggaran rutin/pembangunan. (Gambar 11). Keterangan mengenai kegiatan bulan April

adalah: (1) pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) yang telah ditetapkan; (2) penyusunan/pengajuan perhitungan anggaran tahun lalu untuk mendapatkan pengesahan; dan (3) penyusunan laporan program kerja tahunan yang telah dilaksanakan tahun lalu. Kemudian kegiatan bulan Mei meliputi: (1) pengesahan perhitungan anggaran oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II diterima oleh Kepala Desa; (2) penyusunan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II; dan (3) penyusunan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada LMD. Sementara itu, kegiatan bulan Juni adalah: (1) penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II; (2) penyampaian keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada LMD dalam rapat LMD; dan (3) penyampaian laporan program kerja tahunan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Kegiatan pada bulan Juli merupakan evaluasi pendahuluan yang dilakukan LMD, perangkat desa, dan LKMD terhadap pelaksanaan program kerja tahunan desa, APPKD dan berbagai keputusan desa secara administratif serta peninjauan lapangan. Berikutnya kegiatan bulan Agustus meliputi: (1) penyampaian hasil evaluasi oleh LMD, perangkat desa dan LKMD kepada Kepala Desa; (2) penyampaian informasi tentang kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa oleh LMD kepada Kepala Desa; dan (3) persiapan penyusunan rencana perubahan APPKD dan berbagai keputusan desa terkait. Kemudian kegiatan bulan September masih melanjutkan kegiatan terakhir bulan Agustus.

Adapun jadwal kegiatan rutin pada bulan Oktober terdiri dari: (1) penetapan perubahan APPKD dan berbagai keputusan desa yang terkait; dan (2) pengajuan perubahan APPKD yang telah ditetapkan dan berbagai keputusan desa yang terkait untuk mendapatkan pengesahan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Kemudian kegiatan bulan Nopember meliputi: (1) pengesahan perubahan APPKD dan berbagai keputusan desa diterima oleh Kepala Desa; (2) evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan, APPKD dan berbagai keputusan desa oleh Kepala Desa dibantu perangkat desa dan pengurus LKMD;

dan (3) penyusunan/pengajuan Program Kerja Tahunan Desa untuk tahun yang akan datang. Kegiatan bulan Desember adalah: (1) pelaksanaan perubahan APPKD dan berbagai keputusan desa lainnya yang terkait; dan (2) pengesahan Program Kerja Tahunan Desa untuk tahun yang akan datang oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II. Sementara itu, kegiatan pada bulan Januari merupakan: (1) program tahunan desa untuk tahun yang akan datang sudah diterima Kepala Desa; dan (2) persiapan Pekan Orientasi LMD. Begitu pula pada bulan Februari kegiatannya merupakan pemantapan persiapan pelaksanaan pekan LMD dan pelaksanaan bulan bhakti LKMD. Sedangkan kegiatan bulan Maret adalah: (1) tanggal 1-6 Maret pelaksanaan Pekan Orientasi LMD; (2) awal sampai akhir Maret pelaksanaan bulan bhakti LKMD; dan (3) pengajuan/pengesahan berbagai produk hukum pemerintah desa yang telah dirumuskan dalam pekan orientasi LMD.

Struktur organisasi LMD (Lembaga Masyarakat Desa) Ngadisari terbagi menjadi tiga bidang yaitu bidang I Pemerintahan, bidang II pembangunan, dan bidang III kemasyarakatan. Ketiga bidang tersebut diketuai oleh Sapawi, dan sekretarisnya adalah Supoyo. Masing-masing bidang ini terdiri atas ketua dan beberapa anggota. (Bagan 2 atau Gambar 12).

Jumlah anggota LMD 15 orang. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 1979, setiap pergantian kepala desa harus mengadakan dan menyempurnakan LMD, mengingat pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan LMD. Tugas kepala desa dibantu oleh sekretaris desa. Sekretaris desa dibantu oleh kepala-kepala urusan dan di lapangan dibantu oleh kepala dusun. Hak dan kewajiban LMD ialah wadah menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa. Dan mempunyai hak untuk mencalonkan panitia pemilihan kepala desa (**pilkades**). Anggota LMD adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mampu sesuai peraturan yang berlaku, bertakwa kepada Tuhan YME, loyalitas, dan mempunyai dedikasi terhadap desa dan negara. Yang bertindak sebagai Panitia Pencalonan LMD. Yang mengangkat LMD ialah kepala desa yang membuat nama-nama calon yang diusulkan kepada bupati melalui camat, setelah itu turun surat keputusan bupati yang namanya

terlampir dalam surat keputusan bupati. Setelah itu resmi jadi LMD. Karena ada kepala desa tanpa LMD bukan pemerintahan desa. Perangkat desa masih mempunyai calon mesti diusulkan dulu ke LMD. LMD cukup keputusan dari bupati saja. LMD berhenti karena meninggal dunia, karena pindah tempat tinggal. Jadi sebelum dilantik dari Kades yang lama sudah ada perangkat LMD-nya. Peralihan sejak tahun 1982 sudah ada LMD. Pertimbangan kepala desa sekarang melibatkan mantan kades ialah karena tokoh tersebut sudah mengenal karakteristik masyarakat desa setempat. Termasuk Pak Imam Slamet (mantan pjs. Kades) duduk di LMD, jadi mantan-mantan kades itu masih mau mengabdikan diri dan tidak rela kalau desanya dikatakan bobrok. Selain mantan kades, termasuk semua anggota LMD, kalau seperti dukun, yang ditangani adat. Cuma jadi anggota DPRD sehingga menyalurkan aspirasi melalui perangkat pemerintah daerah, mewakili suara Golongan Karya. Jadi, dukun tidak terlibat dalam LMD karena statusnya sudah masuk DPRD. Sebelum menjadi kepala desa, dukun sudah menjadi Kaur Kesra. Tahun 1980-an, dukun diangkat menjadi anggota DPRD. Dari jabatan Kaur Kesra berhenti tahun 1992 atas dasar permintaan sendiri. Sebetulnya umpamanya tahu, sejak diangkat menjadi DPRD ia harusnya mengajukan permintaan berhenti. Jadi legislatif tidak boleh merangkap eksekutif. Karena ketidaktahuan karena dianggapnya eksekutif di desa itu kecil. Ia pun kemudian mengundurkan diri karena merasa sudah tua. Itu dimusyawarahkan dengan LMD juga, setelah disetujui diteruskan ke Camat. Tokoh agama yang dilibatkan di dalam LMD dan LKMD adalah khusus agama Hindu sebagai agama mayoritas masyarakat Tengger. Adiknya pak Jai sendiri yang menjadi ketua Bidang Kemasyarakatan di LMD. Ia juga tokoh agama, tetapi bukan pendeta, dan bukan panindita. Panindita berada di seksi agama dalam struktur LKMD. Secara struktur organisasi pemerintahan desa, LKMD tidak termasuk ke dalam struktur organisasi desa karena wahana berbeda. Tugas LMD membantu pemerintahan desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Jadi tidak termasuk dalam pemerintahan desa. Dalam tugas pembangunan desa, pemerintahan desa dibantu oleh LKMD. Ketuanya dipilih berdasarkan SK Bupati, setelah dimusyawarahkan dengan LMD, kemudian diajukan ke bupati melalui camat, setelah itu

turun surat dari bupati sebagai tanda pengesahan, kemudian dibuat surat keputusan desa sebagai tindak lanjut. (Bagan 3). Anggota LMD berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia, atau pindah ke luar desa. Keanggotaan LMD mengalami penyempurnaan sejak dibentuk tahun 1984 diperbarui kembali 1991.

Kalau ada warga yang tidak senang terhadap keputusan pemerintahan desa, warga dapat menyalurkan aspirasinya melalui LMD sebelum dilanjutkan ke kecamatan. Misalnya, kalau ada silang pendapat mengenai batas tanah, yang bersangkutan akan dipanggil dan diselesaikan di tingkat desa, jika tidak bisa, baru dibawa ke kecamatan. Petugas yang mengurus perselisihan tanah tersebut bukan kepala urusan pemerintahan melainkan urusan kesra.

Sekarang pak Sukartjo (58 tahun, mantan *petinggi*) duduk di LMD. Menurut pak Sukartjo banyak mantan kades yang tidak sadar kemudian saling *gergeran* setelah tidak menjadi kepala desa. Dalam satu kecamatan Sukapura, mantan petinggi (kades) yang duduk di LMD hanya pak Sukartjo sendiri. Kesediaan Bapak Sukartjo duduk di LMD ialah untuk membantu kelanjutan pembangunan di desanya, selain diminta oleh masyarakat, ia diminta pula oleh petinggi dan direstui oleh pak Camat. Pak Sukartjo mengatakan alasannya karena ia hidup di desa Ngadisari, ia harus membina hubungan dekat dengan kepala desa. Fungsi kontrol LMD menurut pak Sukartjo yang sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang I Pemerintahan di LMD baik kepala desanya bersifat terbuka. Berbeda pendapat menjadi hal yang biasa dalam rapat LMD. Kadang-kadang Kepala Desa, LMD, LKMD bertentangan. Biasanya dalam pertemuan-pertemuan resmi, perangkat desa ini menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini untuk menghindari dari rasa sungkan jika berhadapan atau bertatap muka dengan perangkat desa yang usianya lebih tua atau lebih senior.

Pengambilan suara dengan perhitungan suara terbanyak (voting) tidak pernah terjadi dalam LMD. Setiap keputusan diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Semua dibicarakan dulu dengan perangkat desa dan LKMD sampai tuntas. Sumbangan dari masyarakat untuk kas desa melalui sumbangan pembangunan yang dikoordinasi oleh

LKMD. Sumbangan pembangunan klas 1 untuk penduduk yang potensial sebesar Rp 20.000,00 per keluarga inti. Sumbangan pembangunan klas 2 yang setengah mampu sebesar Rp 15.000,00 per keluarga inti, sedangkan sumbangan pembangunan klas 3 dianggap sudah tidak ada keluarga yang tidak mampu. Penentuan besarnya sumbangan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan ekonomi dari segi fisik bangunan rumah dan kemampuan orang yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan merasa keberatan bisa ditawarkan. Selain itu, setiap tahun juga mendapat bantuan pemerintah untuk pembangunan desa sebesar Rp 3.000.000,00. Dana bantuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan desa atau menunjang dana pembangunan desa, di samping swadaya gotong royong dan kerja bakti dari masyarakat.

Jika penarikan biaya sumbangan pembangunan dari masyarakat tidak disetujui bupati, maka penarikan dana tersebut tidak dapat dilakukan. Jadi setiap ada perencanaan pemungutan dari masyarakat harus di APPKD-kan sebagai dasar hukum. Tanpa itu tidak berani ia memungut sumbangan apapun dari masyarakat. Prosesnya melalui jalur LKMD setelah itu dimusyawarahkan di LMD. Jika LMD keberatan tidak bisa dilaksanakan. LMD berfungsi sebagai alat kontrol pemerintahan desa. Sebelum disahkan oleh LMD tidak ada keputusan desa yang dihasilkan. Selama ini tidak ada mekanisme pengambilan suara (*voting*) karena untuk kepentingan umum harus dilandasi dengan akal sehat. Contoh pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, misal agama, rumah ibadat; bidang pembangunan, untuk meningkatkan industri pangan perlu dibangun jalan; bidang pemerintahan perlu membangun kantor desa, LKMD kemudian menyusun skala prioritas, sarana peribadatan ternyata masih baik pembangunan kantor desa belum perlu karena masih bisa difungsikan, jadi tidak perlu dibangun. (Gambar 13). Sekarang yang perlu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pembuatan jalan. Sehingga jalanlah yang harus dibangun terlebih dulu. Keperluannya sama, tetapi dimusyawarahkan, setelah itu LKMD mempertimbangkan skala prioritas.

Selama ini tidak ada kendala dalam pengambilan keputusan karena LMD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan berfungsi

sebagai alat kontrol pemerintahan desa. Jadi seumpamanya kepala desa berlaku sewenang-wenang atau perangkat desanya berlaku sewenang-wenang sudah ada yang mengontrol yakni LMD. Kalau sampai hal itu terjadi, maka pasti terjadi kekeliruan. Diminta atau tidak diminta LMD itu mesti memberi kepada kepala desa, sebagai bahan pertimbangan. Jadi, pengambilan keputusan harus selaras serasi dan seimbang, dan dipikirkan oleh banyak orang, bukan hanya ditentukan oleh kepentingan pribadi kepala desa sendiri. Kalau menyangkut hal adat, perangkat LMD yang menangani hal itu adalah Bidang Kemasyarakatan (Kesra) yang menangani 4 orang dan 1 orang ketua. Ketua Bidang Kesra adik dari Pak Sujai, kepala dukun. Jadi, semua aspirasi warga desa disalurkan melalui LMD. Semuanya mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Kalau tidak ada yang menyalurkan aspirasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan desa. Bisa jadi keputusan desa kalau sudah disahkan oleh LMD diajukan ke bupati melalui camat, kembali ke desa menjadi keputusan desa sebagai tindak lanjut. Setelah datang dari bupati kalau bertentangan dengan peraturan yang berlaku akan dicoret. Surat Keputusan (SK) Kepala Desa ditandatangani oleh kepala desa. Manakala dipandang perlu, keputusan kepala desa dibuat, umpamanya ada bencana alam, keadaan situasi tidak memungkinkan, biarpun sudah disahkan bupati, kepala desa berhak, mengingat situasi dan kondisi ada bencana alam, maka pemungutan sumbangan dari warga masyarakat ditiadakan atau ditunda. Rencana yang masih bisa ditinggalkan.

Umpamanya tiap KK harus mengeluarkan Rp 200.000,00, tetapi kalau situasinya tidak memungkinkan, kepala desa berhak mengambil keputusan. Sebelum diambil keputusan juga harus dibicarakan dengan LMD. Kalau ada yang diperlukan, misal, retribusi jalan desa, kepala desa buat keputusan, memutuskan, menetapkan, yang menarik retribusi ialah seorang hansip dengan surat tugas terlampir semua kendaraan yang lewat ditarik retribusi sekali jalan sebesar Rp 1.000,00.

Menurut mantan Kades, jika desa Ngadisari berubah statusnya menjadi kelurahan, yang enak adalah masyarakat karena tidak dibebani tarikan biaya lain-lain. Sampai sekarang pembicaraan mengenai hal itu tidak pernah ada kalau tidak dipancing. Kualitas sumber daya manusia di LMD dalam hal cara menyampaikan pendapat belum lancar. Jadi,

kalau punya unek-unek, mau keluar nggak berani bicara, akhirnya diam saja. Kalau sudah demikian, suasananya tidak enak. Pak Sukartjo suka memancing agar suasana rapat hidup dan ingin membuat kader. Kalau tidak ada yang ngomong pak Sukartjo yang bicara suasana dibuat *seng rodo anget* karena pancingan pak Sukartjo, tentunya dengan tujuan yang baik.

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah kas retribusi Taman Wisata Nasional Bromo Semeru Nasional, 30% untuk Dirjen Kehutanan, 20% untuk Taman Nasional, dan 40% untuk Kas Pemda. Yang dikenakan retribusi adalah orangnya sebesar Rp 2.100 per orang termasuk jaminan asuransi, sebagaimana yang tertulis di beberapa panel di pos retribusi yakni: *Dear Guest, according to the Forestry Ministered dated September, 8, 1992 No. 878/KTPS-11/92, we charge you 2.100,00 Rp for entry into the Bromo Tengger and Semeru-National Park. Dibuat di Bromo, April, 1994. Tertanda Bromo National Park* selain itu juga tertulis bahwa setiap pengunjung telah diasuransikan untuk kecelakaan diri (*every visitors is covered by and Insurance Against Personal Accident*).

Khususnya Pemda dalam penarikan retribusi memungut langsung dari warung, rumah makan, toko souvenir termasuk kios-kios yang ada di terminal. Semua toko di kenakan pungutan Pemda dengan tarikan bulanan. Begitu pula dengan PBB, hanya perijinannya lewat desa. Dalam hal ini terminal Desa Ngadisari tidak mempunyai hak untuk memberikan izin membangun karena tanahnya milik Pemda, semua itu diatur dari Dispenda. Masyarakat Desa Ngadisari yang ingin membangun atau mengontrakan rumah harus mendapatkan izin administrasi lewat desa.

Desa Ngadisari jika dilihat sumber pendapatannya, penerimaan tahun ini Rp 45.881.000,00. Sementara itu pengeluaran rutin tahun ini Rp 19.906.000,00 dan pengeluaran pembangunan tahun ini Rp 25.975.000,00. Pendapatan asli desa Rp 36.881.000,00. Bantuan pemerintah Rp 9.000.000,00. Dari pemerintah untuk pembangunan fisik desa mendapat bantuan sebesar Rp Rp 3.000.000,00. Dari PBB diperoleh dana sebesar Rp 600.000,00 (Dati II satu kali dapat). Sedangkan untuk Dati I belum dapat.

Jenis pungutan asli desa khususnya hanya dari retribusi jalan dan kuda sewa. Hal ini idenya diprakarsai oleh LKMD. Sedangkan pemasukan dari Tanah Kas belum ada karena baru diperoleh tahun 1995 seluas 1 ha. Tanah Kas desa ini dikelola oleh desa. Begitu pula dengan bibit bawang prei hanya pengolahannya diserahkan Karang Taruna, dan LMD melalui Koperasi, namun hasilnya untuk desa.

Jenis pendapatan asli desa yang lain yaitu retribusi klas jalan desa, persewaan bangunan milik desa dan peralatannya, seperti Kantor Balai Desa yang disewakan untuk orang yang mempunyai hajjat, seperti perkawinan, dan reklame. (Gambar 12).

Penduduk Desa Ngadisari yang terkena wajib pajak berjumlah 713 orang dengan jumlah SPPT 1781 buah. Petugas pungut ditunjuk dari Sekretariat. Kepala dusun bertanggungjawab di dusunnya masing-masing. Sedangkan RW dan RT melaksanakan serta membagikan SPPT-nya kepada penduduk. Warga penduduk kemudian langsung menyeter kepada kepala dusun yang kemudian diteruskan ke Sekretariat Desa. Jumlah ketetapan Rp 9.649.302,00 namun jumlah realisasi Rp 9.649.302,00.

Struktur organisasi LKMD (Lembaga Keamanan Masyarakat Desa) Ngadisari dipimpin oleh seorang Ketua Umum (Sapawi) yang dibantu oleh Ketua I (Suprpto), dan Ketua II (Uteri Sapawi), serta dibantu oleh pengurus yang lain seperti sekretaris (Surantoko), dan bendahara (Marmoko). Sementara itu Seksi Agama (Sugiono) hanya menangani pembinaan umat Hindu (agama mayoritas Desa Ngadisari), dan Seksi Keamanan dan Ketertiban ditugaskan kepada Senewo yang sekaligus mengkoordinir jadwal kegiatan hansip. Sedangkan seksi P4 (Bambang S.) menangani penataran P4 pola 25 jam, dan Seksi Pemuda serta olah raga (Mujiadi). Seksi ini selain mengelola kegiatan olah raga seperti bulu tangkis, senam kesegaran jasmani, bola voli, catur, dan tarik tambang juga membantu warga dalam pelayanan pembayaran rekening listrik. Rekening listrik ini dikoordinir oleh Karang Taruna. Begitu pula dengan koperasi melalui LKMD dan Karang Taruna menjual obral pupuk, yaitu jenis pupuk urea 50 kg Rp 17.000,00; Sp 36 50 kg Rp 24.750,00; Za 50 kg Rp 18.500,00 dengan harga bonus eceran urea/

kg Rp 400,00; Sp 36;kg Rp 550,00; dan pupuk Za/kg hanya rp 450,00.

Seksi lain dalam struktur organisasi LKMD adalah seksi lingkungan hidup, pelaksanaannya adalah semangat yang bertugas menangani perdagangan disekitar desa agar tampak asri dan indah.

Seksi pembangunan dan perkoperasian, pelaksanaannya adalah Sistowo. Seksi ini merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dan saat ini baru merencanakan kegiatan perkoperasian. Kemudian Seksi Kesejahteraan masyarakat dilaksanakan oleh Hartono yang bertugas membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan ikut memberikan penyuluhan kesehatan. Seksi Pendidikn dan Penerangan dilaksanakan oleh Heru P yang bertugas membantu program pemerintah dalam memberikan penyuluhan tentang program wajib belajar 9 tahun. Seksi terakhir adalah Seksi PKK/KB dilaksanakan oleh Sri Endang.

Seksi terakhir ini menjalankan beberapa kegiatan berupa beras *jimpitan*, sampai sekarang masih dilakukan dan sudah terkumpul sebanyak 3 ton beras namun beras tersebut belum pernah dipergunakan. Maksud dan tujuan beras jimpitan ini untuk diberikan kepada warga yang mengalami musibah dan kesulitan. Kenyataannya, warga Desa Ngadisari tidak ada yang pernah menggunakan beras tersebut. Menurut keterangan warga Desa Ngadisari mempunyai harga diri yang tinggi. Mereka lebih baik memberi daripada menerima bantuan dari orang lain. Kegiatan lain dari PKK adalah berupa arisan (dasawisma). Anggota kegiatan ini sekitar 20-30 orang. Setiap anggota dikenakan wajib membayar uang arisan sebesar Rp 1.000,00. Sedangkan waktu penarikan dilakukan setiap minggu.

Bentuk tolong menolong dalam kehidupan warga Desa Ngadisari terwujud pula pada tradisi menyumbang, yaitu jika diantara warganya mengadakan pesta perkawinan atau musibah kematian. Umumnya kalau pesta perkawinan bentuk sumbangannya berupa beras dan gula, sedangkan jumlahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bentuk sumbangan ini biasanya dibawa oleh para wanita yang diundangnya. Berbeda dengan kaum laki-laknya hanya menyumbang uang. Besar kecilnya jumlah uang yang diberikan sesuai dengan

kemampuan mereka. Tradisi menyumbang ini berlaku pula bagi si penyelenggara hajatan tersebut. Karena jika diantara tamu yang diundang suatu saat melaksanakan hajatan, maka siempunya pesta tersebut berkewajiban menyumbang. Adapun jumlah uang/barang yang disumbangkan harus sesuai dengan yang diberikan. Karena setiap pesta perkawinan ada petugas khusus yang mencatat sumbangan yang diberikan para tamunya. Sehingga si penyelenggara hajatan selalu ingat jumlah sumbangan yang diberikan kepadanya. Hal ini berlaku pula dengan keluarga yang terkena musibah kematian (nyalawat), wujud sumbangannya berupa beras dan uang besarnya tergantung sekarang minimal 1.000,00 sampai 5.000,00 rupiah, biasanya kalau ada orang meninggal ada disediakan *top* (toples) sebagai tempat menaruh uang sumbangan.

Bentuk gotong royong yang lain adalah membantu mendirikan rumah untuk menaikkan atap dan genting, biasanya yang punya rumah menyiapkan jaminan makanan, kecuali tukangnyanya. Tetangga yang membantu menaikkan atap dan genting, tetangga secara gotong royong itu sering disebut "Sayan". Misalkan kalau seseorang mau mendirikan rumah sebelumnya tetangga diberitahukan bahwa besok mau mendirikan rumah (*ngunggahan lambang*) yaitu menaikkan kayu atap yang mengelilingi dinding. Pada waktu pembuatan dinding dikerjakan oleh tukang batu dan tukang kayu. Begitu pula dengan pembuatan rancangannya dikerjakan oleh tukang batu dan tukang kayu. Merancang rumah dilakukan di bawah (*diwindu*, disetel di bawah) kalau sudah mau menaikkan atap rumah biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu, perhitungan ini berdasarkan hari kelahiran. Untuk itu mencari orang yang bisa menentukan hari yang tepat biasanya *orang-orang tua* atau dukun. Jiwa gotong royong masih lekat dalam kehidupan orang Tengger. Biasanya sebelum mengundang tetangga untuk menaikkan atap, yang bersangkutan harus lapor dulu ke desa. Setelah itu baru memberitahukan ke tetangga.

Begitu pula kalau punya hajat juga harus memberitahukan desa. Untuk menentukan hari H, setelah diketahui tanggalnya baru memberitahukan ke desa kapan acaranya mau dilaksanakan. Jadi ketika

menghubungi desa harus sudah tahu kapan hari H-nya. Biasanya yang menentukan hari-H adalah *orang-orang tua* atas dasar perhitungan *neptu nagihan*. Dukun atau orang tua tidak dibayar tetapi sajennya kadang-kadang diberi kepada pak dukun. Di sajen itu diselipkan *sesari* atau uang yang besarnya tidak ditentukan. Kalau hajat kawin resmi melalui catatan sipil (negara). Perkawinan di Tengger selain resmi mengikuti peraturan negara juga dilakukan secara adat. Biasanya dalam pelaksanaannya dilakukan hewan kurban yaitu seekor sapi. Dalam perkawinan ini yang langsung memimpin adalah *dukun*. *Dukun* di sini sama dengan *modin*. Kalau acara persembahyangan dipimpin oleh *pinandita*, kalau upacara perkawinan langsung ditangani oleh *dukun*. Persembahyangan seperti pada hari raya *galungan*, *nilem*, dilakukan di pura. Istilah *sanggar pamujan* lebih lama dipergunakan di desa ini. Artinya, tempat pemujaan atau tempat persembahyangan. *Poten*, seperti bangunan di Bali, memang, kadang-kadang yang memberi khas Tengger. Pada waktu Kasodo itu dipakai, *pinandita* yang memimpin acara persembahyangan, sedangkan *dukun* hanya mengantarkan sesaji di sana. Sebelum acara korban dilaksanakan harus diberi mantera oleh *dukun-dukun*. (Gambar 14). Namun yang memimpin persembahyangan adalah *pinandita*. Sedangkan *dukun* bukan tokoh yang memimpin. Petinggi hanya ikut persembahyangan saja selaku umat.

Tradisi pengukuhan petinggi secara adat sudah hilang, yang masih ada yaitu semasa pemerintahan pak Sukartjo, semua kepala desa sekecamatan mempunyai gelar. Setelah kepala desa yang baru, gelar itu sudah tidak ada lagi. Dalam menangani kasus-kasus desa, desa mempersatukan suami-istri yang ribut seperti kasus kawin lagi, tetapi ketahuan, orang ini langsung dikenakan sanksi, yaitu disuruh mengganti dengan lima sak semen dan disuruh kerja bakti di desa selama 5 hari berturut-turut. Menurut informan yang lain, kasus itu dianggap hanya mengada-ada saja. Kalau suami-istri sampai mau cerai yang menangani desa. Kalau kawin lagi di luar belum pernah ada. Sanksi itu ada di desa, dasarnya dari hukum pemerintah, dari kesepakatan desa pada waktu rapat LMD berdasarkan peraturan pemerintah, adat yang melaksanakan. Contoh: orang yang pernah mengganggu istri orang, si laki-laki sudah mempunyai istri. Ada ketentuan di situ bisa rukun kembali dengan

mengganti material bangunan dengan batu atau semen. Batu sebanyak 2 meter kibik atau semen. Tidak sampai terjadi *carok*, seperti orang Madura, tetapi hanya sampai adu mulut, tetapi bisa diselesaikan oleh kepala desa. Suami-istri itu kemudian rukun kembali. Kasus lain adalah ketika pemilihan Pak kades waktu itu hanya satu orang, tetapi ada pasti yang tidak memilih dia, tidak bisa 100%. Apakah ada orang yang tidak senang dilibatkan, tidak diketahui. Siapa yang tidak milih juga tidak tahu. Ada juga intrik-intrik diluar hanya omong-omong.

LMD itu DPR-nya desa, kalau LKMD itu Perencana dan Pelaksana Pembangunan. LMD adalah perangkat desa. SK-nya bupati. Yang dipilih ketua dan seksi-seksinya. Seksi di LKMD. Perangkat LKMD tidak digaji, bekerja secara suka rela membantu kepala desa dalam hal merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Program pembangunan desa direncanakan oleh LKMD kemudian diajukan ke LMD, LMD yang nanti menentukan menjadi keputusan kepala desa. Rapat keseluruhan LMD mewakili seluruh masyarakat.

Keamanan di Desa Ngadisari berjalan dengan baik, karena dikoordinir oleh Hansip berdasarkan struktur organisasi yang dipimpin oleh Komandan Datasemen, dibantu oleh komandan pleton dan wakilnya, serta sekretaris, bendahara dan pelatih yang membawahi 3 regu. Masing-masing regu beranggotakan antara 10-13 personil, dan mereka umumnya berpendidikan SMA. (Bagan 4).

Tugas Hansip dilakukan secara bergiliran, yaitu menurut waktu selama 12 jam kerja dari pukul 17.00 sore sampai pukul 17.00 sore keesokan harinya. Dalam bertugas mereka diharuskan memakai seragam Hansip dan tidak diperbolehkan bermain catur selama bertugas. Jika tidak hadir pada waktunya, petugas yang bersangkutan harus memberitahukan kepada temannya dengan memberikan alasan yang jelas, misal karena alasan keluarga.

Kasus yang pernah ditangani hansip antara lain menangkap bebera orang pemuda yang tidak membawa identitas setelah didata kemudian disuruh pulang. Kasus lain ialah kebakaran di ladang (tegalan) yang ditangani secara bergotong royong oleh seluruh warga masyarakat

dengan membuat parit agar kebakaran tidak meluas. Kecelakaan mobil masuk jurang pernah terjadi dan dibantu oleh hansip dengan menarik kendaraan yang terperosok ke jalan raya.

Salah satu alat pelengkap yang digunakan petugas keamanan adalah sebuah kentongan kayu yang dibuatkan secara khusus didekat kantor desa. Alat tersebut digunakan pada waktu-waktu tertentu. Seperti jika ada bahaya pembunuhan (degan tanda satu ... satu ... satu kali pukulan); perampokan/pencurian (degan tanda dua ... dua ... dua kali pukulan); kebakaran (dengan tanda tiga ... tiga ... tiga kali pukulan); bencana alam (dengan tanda empat ... empat ... empat kali pukulan); pencurian ternak (dengan tanda lima ... lima ... lima kali pukulan); dan situasi aman (dengan tanda sembilan kali pukulan). (Gambar 15).

Selain itu juga tugas pokok anggota siskamling dikeluarkan oleh Bimas Polisi Probolinggo dalam mensukseskan PO Akas II Probolinggo yang berisikan yaitu (1) menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib di permukiman untuk mendukung kondisi kamtibmas yang mantap dan dinamis; (2) memelihara keamanan lingkungan atas dasar hasrat dan prakarsa sendiri yang berlandaskan asas gotong royong, kekeluargaan dan kebersamaan sebagai perwujudan sistem kamtibmas swakarsa dan sebagai peran serta dalam upaya Bela Negara; dan (3) memasyarakatkan membudayakan daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas yang terjadi dilingkungan permukiman.

Fasilitas hansip hanya disediakan berupa uang makan setiap piket, dan pakaian seragam hansip. Semua itu diperoleh dari desa. Sebagian pemasukan keuangan desa digunakan untuk kas hansip 20%, LKMD 5%, desa 25% sisanya digunakan untuk pengeluaran rutin.

B. STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT DAN AGAMA

Menurut kepercayaan masyarakat Tengger, *Kepala Dukun* dipandang sebagai pemimpin upacara keagamaan yang sudah menjadi tradisi sejak dulu. *Kepala Dukun* dibedakan dengan *Pinandita* (**Pemimpin Agama Hindu**) yang memimpin upacara di **Pura** (*Poten*)

pada saat upacara *Kasodo*. Sedangkan *Kepala Dukun* bertugas membacakan mantera sesaji yang akan diberikan pada upacara korban hasil bumi warga masyarakat Tengger untuk nenek moyang orang Tengger yang bersemayam di gunung Bromo.

Upacara keagamaan pada masyarakat Tengger yang dipimpin oleh *Kepala Dukun* antara lain upacara *Karo*. *Karo* dalam bahasa Tengger berarti dua. Upacara *Karo* diadakan pada bulan kedua menurut perhitungan kalender Tengger. Upacara ini ditujukan untuk roh leluhur dan dewa atau *danyang* desa yang melindungi keluarga Tengger. Upacara *Karo* bertujuan untuk kembali kepada kesucian atau membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan.

Upacara *Karo* diselenggarakan setiap tahun pada bulan kedua. Salah satu alasan diselenggarakannya upacara *Karo* di Ngadisari karena desa ini dianggap sebagai salah satu desa keramat atau tertua di samping desa Jetak dan Wonotoro. Di samping itu, di desa tersebut masih tersimpan jimat *klontong* yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Tengger. Jimat ini terdiri dari gayung, *sarak*, *sodor*, *tumbu*, *cepel*, pakaian nenek moyang, dan sejumlah uang logam. Setelah upacara *Karo* dilaksanakan di desa-desa tua tersebut, baru desa-desa lain di wilayah Tengger menyelenggarakan upacara *Karo* sampai di masing-masing rumah tangga (*somah*).

Lamanya penyelenggaraan upacara *Karo* berlangsung sampai 3 Minggu. Pada masa itu, penduduk Tengger bersilaturahmi dengan kepala desa, *sesepuh* desa, dan dengan warga masyarakat lainnya. Pada hari berikutnya, kepala desa dan perangkatnya, serta orang-orang tua di desa mengunjungi rumah warga masyarakatnya.

Pada masa ini juga digelar tari tradisional *sodoran* yang dianggap mempunyai nilai *sakral*. Tarian ini ditarikan oleh 4 orang penari yang menari saling berhadapan. Jarak penari pada mulanya berjauhan kemudian saling mendekat dengan mengangkat telunjuk ke atas dan bawah sebagai simbol *purusan* dan *pradana* yang menjadi sumber kehidupan alam semesta ini.

Sebelum upacara *Karo* dimulai, setiap kepala keluarga memberikan sumbangan yang berupa uang atau makanan yang disebut *pupon* dan *torun* yang diserahkan kepada kepala desa yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya upacara *Karo*.

Pada saat upacara *Karo* inilah, *Kepala dukun* berperan dalam membacakan mantra untuk *sesajen*, baik yang diselenggarakan di desa, maupun yang diselenggarakan di rumah-rumah. Upacara ini ditujukan bagi *danyang* desa dan roh leluhur agar tidak mengganggu warga masyarakat Tengger, memperoleh tanah pertanian yang subur, dan terhindar dari roh jahat yang dalam bahasa setempat disebut **selametan tanduran** (*ngeliweti*).

Sesajen yang diperlukan dalam upacara *Karo* ini adalah (1) air suci yang diambil dari gua widodaren yang diberi mantra oleh *kepala dukun*; (2) tumpeng yang terdiri dari nasi, ayam dan buah-buahan; (3) bunga beraneka ragam; (4) jenang merah putih; dan (5) pisang (*gedang*) *ayu*.

Adapun mantra yang dibaca oleh *kepala dukun* biasanya mantra *purwa bhumi* sebagai berikut:

Hong pikulum purwa bumi kamulane Bathari Uma
Mijil saking limun limunira paduka Bathara;
Mulane ta ana Bethari pinaka sami Bathara;
Ayoga sira dewata, mijil panca resi,
Kusang, Garga, Mestri,
Sang Kurusa, Sang Printajala.

Mantra ini berisi tentang kejadian alam semesta, termasuk kejadian manusia yang di dalamnya terdapat ajaran bahwa manusia diwajibkan melaksanakan pemujaan kepada kekuatan supernatural (Widyaprakosa, 1992:78).

Setelah *kepala dukun* membacakan mantra bagi *sesajen*, sebagian *sesajen* bersama *sesari* (imbalan jasa yang tidak ditentukan besarnya) diberikan kepada *kepala dukun*, sedangkan sebagian yang lain

dibawa ke tegalan agar tegalan terbebas dari pengaruh roh jahat.

Adapun *sesajen* pada upacara *Karo* di desa sebagai *banten* dinamakan *kayopan agung* yang terdiri dari 3 nyiru yang berisi 9 buah tumpang kecil beserta lauk pauk seperti sate isi perut hewan, sayur *kara*, *jaudah* ketan putih dan ketan hitam, *conthong* yang berisi *apem*, pisang, seikat pisang gubahan daun sirih, kapur dan sepotong pinang yang dikenal sebagai *jambe ayu*. Perangkat upacara yang lain adalah sedekah *praskayopan* yaitu sedekah terdiri dari setumpuk daun sirih dan takir yang berisi pinang dan beraneka macam bunga. Dalam *sesajen* itu ditaruh pula *srembu* yakni sebuah *pincuk* kecil yang di dalamnya berisi umbi, tales, dan kacang yang direbus dan diberi kelapa parut.

Seperangkat *sesajen* kemudian dinaikkan ke loteng bersama jimat *klontong*. Dukun kemudian membacakan mantera agar warga masyarakat desa dijauhi dari malapetaka dan diberkahi keselamatan, dan kesejahteraan. Pada malam harinya dibunyikan musik gamelan yang diteruskan dengan permainan teka-teki dan *sodoran*. Usai permainan ditutup dengan mantera oleh dukun. *Sesajen* diturunkan dari loteng dan *sesajen* disertai dengan uang logam dibagi-bagikan kepada penduduk. Warga mempunyai keyakinan bahwa *sesajen* dan uang logam itu bisa dijadikan jimat.

Selama diselenggarakan upacara *Karo*, *kepala dukun* setiap hari harus mengunjungi rumah-rumah penduduk di wilayah desanya. Tugas tersebut memerlukan kesabaran dan kekuatan fisik yang prima karena setiap hari harus mengunjungi rumah penduduk yang letaknya cukup berjauhan.

Setiap tanggal 15 bulan *Karo* dilakukan acara *Nyadran* bersama-sama seluruh keluarga ke makam yang ada di desa sebagai upacara terakhir hari raya *Karo* yang dilakukan pada pagi hari saat cuaca terang.

Upacara besar lainnya yang dipimpin oleh *kepala dukun* ialah upacara *Kasodo* yang dilakukan pada tengah malam tanggal 15 bulan purnama atau bulan kedua belas menurut kalender Tengger. Upacara ini diselenggarakan di Lautan Pasir yang pada mulanya merupakan legenda *Roro Anteng* dan *Joko Seger*. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada

sepasang suami istri yang belum memperoleh keturunan, setelah enam tahun bertapa, permohonannya dikabulkan dengan mendengar *wisik*, apabila beranak pinak sampai 25 orang, anak yang bungsu harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Syarat tersebut dengan rasa berat diterima oleh *Roro Anteng* dan *Joko Seger*.

Setelah mempunyai anak yang ke-25, anak bungsu yang diberi nama *Raden Kusumo*, maka gunung Bromo mengeluarkan suara gemuruh mengeluarkan api. Hal itu sebagai tanda bahwa *Roro Anteng* dan *Joko Seger* harus menepati janji. Akan tetapi, sebagai orang tua, *Roro Anteng* dan *Joko Seger*, tidak rela mengorbankan anaknya sehingga *Raden Kusumo* disembunyikan di suatu tempat yang aman. Namun, semburan api gunung Bromo akhirnya sampai juga di tempat persembunyiannya, dan *Raden Kusumo* diseret oleh jilatan lahar kawah gunung Bromo terdengar suara bahwa Raden Kusumo rela menjadi korban demi kesejahteraan dan kedamaian seluruh keluarga dan masyarakat daerah ini. Selanjutnya ia berpesan bahwa setiap tanggal 15 bulan *Kasodo* seluruh keluarga dan masyarakat daerah harus mengirim hasil bumi yang ada di kawasan Tengger. Sejak saat itu sampai sekarang setiap tanggal 15 bulan *Kasodo* masyarakat Tengger menyelenggarakan upacara *Kasodo*. Mereka mempunyai keyakinan apabila tidak melakukan upacara tersebut maka akan timbul malapetaka yang akan menimpa masyarakat Tengger.

Dalam upacara *Kasodo*, peranan dukun sangat besar. Dukun menjadi pusat seluruh aktivitas upacara sejak mempersiapkan *sesajen* sampai berlangsungnya upacara pengorbanan *sesajen* ke bawah kawah gunung Bromo. Pada upacara ini semua dukun yang ada di kawasan Tengger yakni kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang berkumpul. Di antara puluhan dukun tersebut ada yang berperan menjadi *kepala dukun* yang akan memberi pengarahan dan nasehat kepada dukun yang lain. Para dukun yang sudah berkumpul duduk berkeliling menghadap ke arah *poten*. Pada waktu itu *kepala dukun* membawa seperangkat upacara seperti *prapen*, *prasen* yang terbuat dari peninggalan Majapahit dan dari *prasen* inilah air suci untuk upacara dipercikkan. *Prasen* berbentuk timba terbuat dari bahan kuningan atau

perunggu. Gunanya untuk tempat air suci yang sudah dimanterai oleh dukun untuk dipercikan pada *sesajen*, badan mayat atau kubur setelah menguburkan mayat, dan kepada kedua mempelai dalam suatu perkawinan. Ukuran *prasen* tinggi lebih kurang 17 cm, garis tengah bagian atas 15 cm, garis tengah bagian bawah lebih kurang 13 cm. Adapula ukuran yang lebih besar. Pada bagian dinding *prasen* sebelah luar disekelilingnya bergambar ketam, kuda, dll. Prapen adalah tempat api (perapian) untuk membakar kemenyan pada waktu dukun mengucapkan mantera. Besarnya sepadan dengan *prasen*. Ada yang memakai pegangan seperti cangkir, dibuat dari tanah liat. Selain itu terdapat pula *slempang*, lebarnya selebar setagen (kain pembalut pinggang, panjangnya lebih kurang 3 meter. Dihias dengan benang emas. Pada kedua ujungnya diikatkan lima buah mata uang *kepeng*. Gemerincing bunyinya bila *slempang* disentak-sentakan waktu dukun membaca mantera. Lima *kepeng* padang tiap-tiap ujung *slempang* ini menyatakan simbol *hari pasaran*. *Slempang* ini dibelitkan pada pinggang. Di bagian dada disilangkan. Kedua ujung *slempang* disampirkan di atas kedua bahu arah belakang. Di Ngadisari, cara memakai *slempang* agak berlainan pada bagian belakangnya. Kedua ujung *slempang* yang membelit pinggang dukun. Pada bagian depan disilangkan. Pada upacara *sesanding*, *dukun* mengucapkan mantera sambil dilagukan. Ujung *slempang* sebelah kanan diletakkan di atas telapak tangan. Sehabis membaca mantera itu, ujung *slempang* kanan tadi digerak-gerakkan tiga kali hingga gemerincing bunyinya. *Genta*, berbentuk seperti lonceng biasa, memakai pegangan. Hanya dipergunakan pada waktu perayaan *Kasodo* dan pada waktu ada upacara kematian atau upacara *entas-entas*. Cara membunyikan disesuaikan dengan irama gamelan yang mengiringnya. Selain peralatan itu terdapat bambu yang melengkung setengah lingkaran yang dihias 30 macam buah-buahan dan beraneka macam kue. Selain itu masih dilengkapi dengan berbagai macam *sesajen* yang berupa hasil bumi daerah Tengger. *Sesajen* ini oleh masyarakat Tengger dikenal dengan sebutan *ongkek*. Bahan untuk membuat *ongkek* ini diambil dari desa yang selama satu tahun tidak terdapat warga yang meninggal dunia. Setelah *sesajen* yang berupa *ongkek* dibacakan mantera oleh *kepala dukun* kemudian *sesajen*

tersebut dilempar ke kawah gunung Bromo. Upacara *Kasodo* ditujukan untuk melantik calon dukun baru yang akan diuji kemampuannya tentang bacaan mantera-mantera yang jumlahnya mencapai 600 macam dengan disaksikan oleh seluruh dukun dan aparat pemerintah.

Dukun memberikan air suci dan membacakan mantera agar air suci tersebut disiram ke liang lahat. Setelah upacara penguburan diadakan pembacaan mantera oleh *kepala dukun* yang intinya berasal dari bumi kembali ke bumi. Asalnya dari **Sang Hyang Widi** kemudian kembali ke pangkuannya. Setelah penguburan selesai, di rumah duka ada upacara, misal yang juga dipimpin oleh *kepala dukun*. Upacara ini bermakna memisahkan antara orang yang sudah mati dengan keluarganya yang masih hidup. Pada waktu berikutnya ada upacara pembakaran *petra* yang bahannya terbuat dari daun *klotok*, disertai dengan *sesajen* lain, seperti bunga, pisang *ayu*, dan sebagainya. *Petra* yang berbentuk seperti boneka dibungkus dengan pakaian sehari-hari kemudian dibawa ke *punden* peleburan untuk dibakar. Sebelum upacara pembakaran *petra*, dukun memeriksa *sesajen* dan setelah lengkap dibacakan *mantera* kemudian dibakar. Dalam upacara *petra* ini memerlukan biaya untuk membuat *sesajen* dan selamatan, namun bagi yang belum mampu ditunda sampai mempunyai uang yang cukup untuk melaksanakannya. Upacara *petra* ini bermaksud agar roh yang meninggal bisa diterima di sisi **Sang Hyang Widi**.

Dalam menyiapkan upacara kematian terutama untuk membuat *sesajen* yang beragam jenisnya dukun dibantu oleh *Tiyang Sepuh*. Ia diangkat oleh esa berdasarkan usul dari dukun dalam melaksanakan upacara kematian.

Setelah meninggal pada hari yang ke-1.000 dilakukan upacara *entas-entas*. Upacara ini bertujuan untuk mengangkat *atman* atau roh orang yang meninggal agar dapat masuk surga. Dalam melaksanakan upacara *entas-entas* ini memerlukan biaya yang besar, bagi yang mampu berkisar 10-20 juta. Untuk itu kadangkala upacara *entas-entas* dilakukan secara bersama dengan acara perkawinan salah satu keluarga inti. Biaya yang besar itu disebabkan pada awal upacara dimulai dengan penyembelihan kerbau jantan sebagai korban kepada **Sang Hyang Widi**. Sebelum pemotongan kerbau didahului dengan pembacaan mantera oleh *dukun*. Pembacaan mantera memakan waktu antara 1,5 - 2 jam. Setelah disanding dengan *sesajen* yang beraneka macam, kemudian daging

sebagian daging kerbau dipergunakan untuk pelaksanaan korban. Untuk melaksanakan upacara *entas-entas*, keluarga yang bersangkutan datang ke rumah dukun dengan menanyakan kepastian-kepastian penyelenggaraan upacara. Dalam hal ini dianggap mengetahui banyak tentang *wuku* dan hari baik pelaksanaan upacara ritual keagamaan.

Adapun urutan-urutan upacara *entas-entas* yakni pertama-tama; *meppeg* yakni mengumpulkan seluruh keluarga dan anggota kerabat dari orang yang meninggal. Pada waktu itu dibicarakan masalah biaya, rangkaian upacara, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan upacara. Kedua, *prepegan*, yakni pemberian *sesajen* kepada orang yang sudah mati. Dalam acara ini peranan dukun sangat besar terutama yang berkaitan dengan persiapan sesajen. Ketiga, *bawahan* yakni merupakan puncak acara yang disebut *melukat* dengan acara pembacaan mantera pada *sesajen* yang sudah tersedia. Dalam kesempatan ini wakil dari keluarga meminta maaf pada hadirin apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal tersebut.

Dukun juga mempunyai peran yang menonjol dalam upacara perkawinan, bagi masyarakat Tengger, perkawinan baru dianggap sah apabila direstui dan diupacarai oleh dukun. Oleh karenanya masyarakat Tengger yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada dukun selain pada petugas-petugas catatan sipil. Sebelum pelaksanaan perkawinan, kedua calon mempelai berkonsultasi dengan dukun mengenai hari pelaksanaan upacara perkawinan. Mereka beranggapan bahwa dukun mempunyai perhitungan yang didasarkan dari ketentuan yang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Penentuan hari-H sangat penting bagi kelangsungan rumah tangga. Apabila pelaksanaan perkawinan tepat pada hari yang baik, maka keluarga tersebut akan memperoleh rintangan-rintangan yang berat.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan kehadiran dan peranan dukun sangat besar, seperti dalam upacara adat *walagara*. Dukun yang dibantu pembantunya mempersiapkan sesajen yang diperlukan dalam upacara ini yang terdiri dari berbagai jenis seperti tebu, padi, berbagai jenis buah-buahan, bermacam-macam jenis kue (*jajan pasar*), dan bunga. Setelah sesaji upacara sudah terpenuhi, maka dukun yang telah

berpakaian adat lengkap memimpin upacara dengan memercikkan air suci dari *prasen* dan membacakan mantera sesajen yang akan digunakan untuk upacara *walagara*. Setelah itu sebagian *sesajen* dihidangkan kepada hadirin yang menghadiri upacara.

Kehadiran *kepala dukun* sangat diperlukan oleh masyarakat Tengger, terutama apabila akan diadakan upacara, seperti upacara kelahiran. Apabila bayi lahir pada waktu yang tidak baik, maka bayi tersebut harus *diruwat*. Dalam upacara ini dipimpin oleh *kepala dukun* yang dibantu oleh *legen* yakni pembantu dukun yang mempersiapkan *sesajen* untuk upacara kelahiran. Dalam upacara *ruwat* ini ada mantera khusus yang dibacakan agar bayi tersebut kelak di kemudian hari dijauhi dari gangguan roh jahat. Selain itu, *kepala dukun* juga diperlukan oleh masyarakat Tengger yang akan mendirikan rumah. Mereka meminta kehadiran *kepala dukun* untuk membacakan mantera dan seperangkat *sesajen*. Adapun tujuannya agar rumah yang dibangunnya dijauhi dari gangguan roh jahat dan mala petaka. Adapun *sesajen* yang diperlukan untuk membuat rumah terdiri dari ketupat lepet, pohon pisang, tebu, wringin, pinang, bubur merah putih, *roko* yang terbuat dari ketan, segoliwet, tumpeng yang semua makanan untuk sesajen itu tidak diberi garam. Tentunya unsur-unsur *sesajen* dalam pembuatan rumah ini mengandung simbol-simbol yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu juga terdapat kain merah putih yang dijadikan satu dengan *sesajen* di atas.

Sebagai *agen perubahan sosial*, *kepala dukun* tampak berperan sebagai **agency** di bidang sosial ekonomi pertanian. Masyarakat Tengger sebelum tahun 1970, umumnya menanam tanaman jagung dan ketela pohon di lahan pertanian mereka. Tanaman-tanaman tersebut secara ekonomis tidak banyak menghasilkan uang, selain hanya dijadikan bahan makanan pokok. Setelah tahun 1970-an terjadi perubahan pola tanam dari tanaman yang kurang menguntungkan menjadi pola tanaman yang lebih menguntungkan, seperti tanaman kentang, kubis, wortel, bawang *prei*. Dalam memperkenalkan ide-ide perubahan, dukun berperan dalam menyampaikan pembaruan di bidang pertanian melalui jalur formal, seperti dalam pertemuan-pertemuan adat, maupun pertemuan rapat desa,

PKK dan sebagainya. Latar belakang dukun mau memperkenalkan perubahan jenis tanaman penduduk setelah melihat keberhasilan pak Ucik, salah seorang petugas pertanian di daerah Ngadisari pada tahun 1960-an memperkenalkan tanaman kentang. Sejak saat itu, dukun secara pelan-pelan menginformasikan tanaman kentang dan sayur mayur kepada masyarakat. Untuk memahami teknis penanaman, dukun menjadi tumpuan para warga masyarakat Tengger untuk mempelajari cara penanaman mulai dari pembibitan, pemupukan, penanaman, dan cara panen. Apabila mengalami hambatan dan kesulitan tidak jarang dukun melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga resmi penelitian. Namun pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak persoalan-persoalan dalam penanaman, maka disarankan oleh masyarakat untuk berkonsultasi dengan lembaga pertanian yang ada di Wonosobo Jawa Tengah dan Pengalengan Jawa Barat. Ternyata dari konsultasi dengan lembaga-lembaga pertanian yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat membawa hasil yang positif bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat Ngadisari memiliki ketrampilan yang baik dalam penanaman tanaman yang bernilai ekonomis tinggi tersebut. Hasil dari konsultasi itu dipraktekkan oleh pak Sukarma di tegalnya sendiri, setelah tampak hasilnya baru diinformasikan kepada warga masyarakat desa setempat (Edy Burhan Arifin, 1993/1994).

Peranan lain dari dukun Tengger yang sudah berlangsung sejak dari dulu dengan diresmikannya penyebutan agama masyarakat Tengger menjadi agama Hindu pada tahun 1973. Di tempat lain usaha mempersatukan agama dan adat ini seringkali menimbulkan ketegangan sosial pada masyarakat. Akan tetapi, hal seperti itu tidak terjadi pada masyarakat Tengger. Masyarakat Tengger yang sebelumnya memeluk agama adat yang dikenal dengan istilah agama *Budo*, pada tahun 1973 diupayakan memeluk salah satu agama besar yang ada di Indonesia. Salah satu agama yang dekat dengan keyakinan adat masyarakat Tengger ialah agama Hindu. Tentunya menghindukan masyarakat Tengger ini disponsori oleh pemerintah yang memang mempunyai kewajiban mengatur agama yang ada pada masyarakat Indonesia. Dalam usaha ini pihak pemerintah melakukan pendekatan dengan dukun yang ada di daerah Tengger yakni dengan mengkursuskan mereka pada pusat-pusat

pendidikan agama Hindu terutama yang ada di daerah Singosari Malang. Oleh karenanya dukun pada waktu itu menjadi penerang pada masyarakat di daerahnya masing-masing. Dalam kursus-kursus keagamaan itu dukun banyak memperoleh pengetahuan tentang substansi kitab *Weda* yakni kitab resmi agama Hindu. Menurut pak **Suprpto** seorang guru agama Hindu di Desa Ngadisari dalam proses penetapan agama Hindu pada tahun 1973 peranan dukun sangat besar, karena dialah yang banyak memberikan informasi-informasi keagamaan pada masyarakat Tengger. Dalam hal ini timbul suatu persoalan menarik mengapa dalam proses penghinduan itu menggunakan dukun? Maka sebagai jawaban dari persoalan itu karena dukun sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat Tengger daripada pimpinan formal. Dukun dipandang mempunyai kewibawaan karena pandai berpidato dan memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cata dan keyakinan sebagian besar warga masyarakat (murah hati dan sebagainya). Dukun mempunyai wewenang memimpin setiap upacara adat dan daur hidup, mempunyai keturunan sah dari dukun, mampu melaksanakan upacara-upacara, dan memiliki pusaka-pusaka keramat yang melambangkan wewenang dari kekuatan supernatural. Dukun juga dipandang mempunyai kharisma karena kekuatan sakti dengan mantera-manteranya. Dukun juga dapat mengerahkan kekuatan fisik dan mengorganisasi orang banyak atas dasar suatu sistem sanksi dari kekuatan supernatural. Selain itu, dukun dikategorikan sebagai *sulinggih* yang berhak menentukan segala urusan keagamaan masyarakat Tengger. Dengan posisi yang strategis itulah menyebabkan proses penghinduan berjalan dengan lancar di daerah Tengger. Kendatipun sejak saat itu ada pembagian tugas yang tegas antara dukun dan pemuka atau pemimpin agama Hindu yang terdapat didesa masing-masing. Dukun lebih cenderung mempunyai tugas untuk mengemban dan memimpin adat istiadat Tengger yang sudah berlaku sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Di pihak lain pemuka agama Hindu memimpin upacara keagamaan di pura seperti *galungan* dan sebagainya. Di Desa Ngadisari yang menjadi pemuka dan guru agama Hindu ialah pak Suprpto yang masih keponakan dari pak Sujai. Pak **Suprpto** ini memang disarankan oleh pak Sujai untuk menjadi guru agama Hindu di Ngadisari. Sampai saat sekarang masih belum pernah terjadi konflik antara dukun dengan pemuka agama Hindu.

Sebelum tahun 1973, masyarakat Tengger dalam bersembahyang dilakukan di *danyang* atau *punden* yang dianggapnya sebagai tempat yang sakral, pusat dari roh nenek moyang, dengan membaca doa dalam bahasa Jawa. Namun, setelah tahun 1973, pusat persembahyangan dipusatkan di sanggar yang didirikan di Desa Ngadisari dan menggunakan kitab suci *Weda*.

Salah satu faktor yang memperlancar Hidunisasi pada masyarakat Tengger menurut pak Sujai adalah banyaknya persamaan antara ajaran Hindu dengan adat istiadat Tengger, seperti upacara *galungan* dan *kuningan*, masyarakat Tengger sudah lama melakukan upacara tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidak semeriah di Bali. Selain itu, terdapat persamaan ajaran Hindu, seperti ajaran *karmapala* dalam agama Hindu, sudah terdapat pula dalam ajaran adat Tengger yakni sama dengan ajaran *kuwalat*. Demikian pula dengan ajaran *reinkarnasi*, terdapat persamaan ajaran dengan agama Hindu Bali. Adapun yang membedakan, selain bentuk ritual, juga peristilahan. Sebelum tahun 1973, masyarakat Tengger menyebut Tuhan mereka dengan istilah *Seng Kuoso*, *Pangeran*, dan *Gusti Kang Maha Agung*. Setelah tahun 1973 sebutan tersebut diganti dengan *Sang Hyang Widhi*.

Selain itu dukun juga berfungsi sebagai motivator dalam menyukseskan program pemerintah. Dukun yang berfungsi sebagai panutan masyarakat Tengger dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyukseskan program-programnya. Salah satu contoh, pada tahun 1970-an yakni tatkala pemerintah dengan gencar berusaha menerapkan program Keluarga Berencana, pemerintah memanfaatkan dukun sebagai motivatornya. Pada tahun 1972, pak **Suja'i** dipercaya untuk menjadi petugas Keluarga Berencana Desa yang tugasnya memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat Tengger supaya mengikuti dan melaksanakan program Keluarga Berencana.

Selain hal di atas, pemerintah juga memanfaatkan dukun dalam menyukseskan program kesadaran wajib belajar kepada penduduk Tengger. Dalam hal ini, dukun dengan perlahan-lahan menjelaskan kepada masyarakat Tengger tentang arti penting pendidikan dalam

masyarakat. Sebagai langkah awal *kepala dukun* memberi contoh pada keluarganya sendiri. Sebagian besar anak-anaknya bersekolah ke tingkat lanjutan, bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi di Malang, Surabaya, dan Jember. Adapun salah satu sarana yang dimanfaatkan oleh dukun untuk memotivasi program pembangunan dari pemerintah melalui sarana resmi dan tidak resmi. Sarana resmi misalnya dalam kesempatan tatkala dia memimpin upacara. Sebelum upacara dilaksanakan ia memberi penjelasan pada masyarakat, juga dalam kesempatan rapat di balai desa, rapat PKK, dan sebagainya.

Posisi strategis dukun di masyarakat menyebabkan pemerintah berusaha merangkul sebagian dukun terkemuka untuk masuk dalam lembaga pemerintah. Salah satu contoh Perwakilan Daerah **Golongan Karya** Kabupaten Probolinggo telah memanfaatkan pengaruh bapak **Suja'i** menjadi anggota **DPRD** kabupaten Probolinggo yang sampai sudah memasuki 3 periode. Dengan mengangkat *kepala dukun* menjadi anggota **DPRD**, pemerintah mengharapkan agar Kepala Dukun dapat menarik massa **Golongan Karya** sebanyak mungkin di daerah Tenger. Hal itu terbukti dari hasil **Pemilu 1992** Desa Ngadisari mayoritas penduduknya memilih **Golongan Karya** dengan jumlah suara 886 orang, **PDI** sebanyak 66 orang dan **PPP** hanya 1 orang. Jika ada pejabat pusat yang berkunjung ke Desa Ngadisari tidak langsung mengunjungi Kepala Desa Ngadisari, tetapi ke kepala dukun, pak Suja'i.

Dukun selain berperan di bidang keagamaan dan politik, juga berperan sebagai penasihat. Hal ini terlihat apabila akan diadakan pemilihan kepala desa, dukun dijadikan panutan warga masyarakat karena dianggap mempunyai kharisma dan menjadi penasihat siapa yang akan dijadikan calon kepala desa dan melakukan upacara selamat *resik* setelah upacara pelantikan dengan tujuan untuk membersihkan diri dan upacara *mayu* untuk meyakinkan kepala desa agar tidak ragu menjalankan pemerintahan karena telah mendapat restu secara adat.

Selain itu dukun juga tempat bertanya masalah supernatural, apabila ada penduduk yang kesurupan roh jahat, masyarakat akan berkonsultasi kepada dukun karena dipandang pandai menghitung *neptu hari pasaran*, jika yang keluar simbol pisang, artinya yang menyebabkan

sakit adalah roh yang *mbaurekso punden*; simbol *sanggar*, artinya si sakit ditempli roh yang ada di dalam rumah; simbol *wringin*, artinya sumber penyakit ialah roh yang *mbaurekso* Desa Ngadisari; simbol *banyu*, artinya si sakit ditempli roh yang menghuni *babakan*, sungai, dan sumur. Dengan melihat pedoman arah angin *wetan*, *kidul*, *kulon*, dan *lor*, jika telah ditemukan sumbernya, si sakit berjanji akan memberi *sesajen* di tempat tersebut. Jika janji tersebut tidak ditepati, maka si sakit akan sakit kembali.

Segala sesuatu yang terkait dengan pemujaan, ataupun upacara keagamaan, baik berupa alat ataupun bentuk lainnya dapat diberi lambang sebagai berikut:

1. Warna pada makanan

- juadah merah adalah lambang Brahma
- juadah putih adalah lambang Iswara
- juadah hitam adalah lambang Wisnu
- juadah kuning adalah lambang Mahadesa

2. Paka

- pisang adalah lambang kerukunan hidup
- sirih adalah lambang Wisnu
- jambe adalah lambang Brahma
- gamping adalah lambang Iswara
- lauk pauk adalah pengorbanan
- tumpeng adalah ketinggian dalam ilmu
- kue adalah kemandirian (kue harus dibuat sendiri, tidak boleh beli dari pasar).

3. Kiblat

- timur berwarna putih, berarti: matahari terbit di timur, manusia lahir, juga berarti paningal (*penglihatan*).
- selatan berwarna merah, berarti pula *pamireng* (pendengaran)
- barat berwarna kuning, *pangambu* (penciuman)
- utara berwarna hitam, *pengucap*
- tengah berwarna mancawarna, *pangrasa* (perasaan).

Falsafah hidup orang Tengger tidak dapat dipisahkan dari lambang-lambang tersebut dan beranggapan bahwa *timur* adalah terbitnya matahari yang melambangkan permulaan hidup (*wetan*: 'wiwitan itu permulaan'), dengan warna putih yang berarti kesucian, kebersihan, ataupun belum ada tulisannya. Selatan atau *kidul* melambangkan ibu sebagai sarana kelahiran manusia dengan warna merah sebagai lambang darah atau keturunan (*kidul* diartikan pula *didudul* dan *didorong*). Barat atau *kulon* diartikan bapak. Utara atau *lor* diartikan dengan lahir. Sedangkan tengah dianggap mancawarna atau bentuk yang terjadi (Simanhadi Widyaprakosa, 1994, 66-67).

Berdasarkan hal di atas, wibawa dukun ternyata juga sangat populer di kalangan masyarakat luas dan di luar daerahnya, memiliki kapasitas berfikir rasional dalam membantu program pemerintah dan memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap kecendekiawanan lainnya. Dukun juga dipandang mempunyai legitimasi melalui prosedur adat dan upacara atau hukum adat yang berlaku dalam pengukuhan jabatan kepala desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat Tengger mengenal struktur pemerintahan adat berdasarkan legenda tentang *Roro Anteng* dan *Joko Seger* yang diyakini oleh masyarakat Tengger bahwa kedua orang itulah yang menjadi cikal bakal orang Tengger sekarang. Di samping itu, masyarakat Tengger percaya bahwa adat dan upacara yang dilaksanakan oleh orang Tengger sampai saat ini merupakan warisan nenek moyang yang harus dipegang teguh. Kalau adat dan upacara tersebut tidak dipatuhi, orang Tengger akan menanggung akibat kemarahan dewa yang menghuni gunung Bromo.

Inti dari setiap adat dan upacara yang dilakukan oleh orang Tengger sampai saat ini ialah untuk mencari keselamatan baik di dunia maupun di alam baqa. Orang Tengger percaya bahwa perilakunya di dunia akan dibalas nanti di alam baqa. Oleh karena itu, orang Tengger lebih baik mencegah berbuat di luar dari ketentuan adat yang berlaku daripada menanggung akibat yang ditimbulkannya.

Dalam struktur adat, *kepala dukun* menempati kedudukan yang paling tinggi karena kepala dukun diyakini kemampuannya melebihi kemampuan orang biasa karena mampu melaksanakan laku prihatin sebelum menjadi dukun. Sebelum keluar peraturan tahun 1973 tentang penyebutan nama agama atau kepercayaan yang dianut orang Tengger, orang Tengger menyebut agama mereka agama *Budo Tengger* yang

berbeda dengan ajaran agama Budha (Sidharta Gautama). Agama Budo ini merupakan nama lain dari penyebutan agama Jawa kuna yang diwarisi sejak masa kerajaan Majapahit.

Kedudukan kepala dukun merupakan kedudukan tertinggi secara adat. Kedudukan lain secara adat tidak ada, kecuali pembantu-pembantu dukun, seperti *tiyang sepuh*, *dandan*, dan *legen*. Tetapi, penghormatan masyarakat terhadap kepala dukun hampir tidak mungkin dihindari karena seluruh kehidupan masyarakat sejak dilahirkan, menikah, sampai mati tidak dapat melepaskan kehidupan spiritualnya dari peranan *kepala dukun*. Dengan kata lain, sebagai tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai kewibawaan karena pandai berpidato (memberi penyuluhan) dan memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan sebagian besar warga masyarakat (murah hati). *Kepala dukun* juga dipandang mempunyai wewenang dalam setiap upacara adat. Dukun juga dipandang memiliki kekuatan sakti, meskipun tidak satupun warga masyarakat yang menyebutnya demikian. Dalam setiap upacara, dukun selalu membaca mantera yang berjumlah sampai 600 jenis. Kadang-kadang dukun harus membaca mantera selama 1 jam sampai 2,5 jam. Jika belum dibacakan mantera, tidak dapat melakukan upacara adat, dan dianggap tidak sah. Sebagai contoh, perkawinan. Meskipun, kedua pengantin sudah kawin secara agama Hindu, dianggap belum sah secara adat jika belum diupacarai oleh kepala dukun. Oleh karena itu, dalam setiap perkawinan, yang mensahkan kedua pengantin bukan *pinandita* (pemimpin umat agama Hindu), melainkan *kepala dukun*.

Kedudukan *pinandita* adalah pemangku agama di pura (*sanggar*). Jika melakukan persembahyangan di pura atau *sanggar*, yang menjadi pemimpin umat adalah *pinandita*. Pada waktu upacara Kasodo di *poten*, kedudukan *kepala dukun* lebih rendah dibandingkan dengan *pinandita*, baik kepala desa, kepala dukun, dan warga masyarakat yang lain harus mengikuti tata cara yang dipimpin oleh *pinandita*.

Karena kedudukan dan peranan kepala dukun sangat dominan di berbagai sektor kehidupan, apalagi ditambah bahwa *kepala dukun* yang sekarang sudah menjadi anggota DPRD mewakili suara

Golongan Karya selama tiga periode, adalah jabatan yang terhormat yang pernah dijalani kepala dukun secara rangkap. Sebelum kepala dukun diangkat menjadi anggota DPRD Dati II Probolinggo, ia pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Kesra semasa periode pak *petinggi*, Sukartjo, sampai periode pak Sapawi. Sebenarnya kedua jabatan itu tidak boleh dijalankan secara rangkap karena anggota DPRD adalah lembaga legislatif di Daerah Tingkat II, sedangkan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) adalah lembaga eksekutif. Atas dasar keinginan sendiri, kepala dukun sejak 3 tahun ini sudah tidak menjadi Kepala Urusan Kesra. Tetapi, untuk menjaga pengaruhnya di pemerintahan desa. Kepala dukun memasukkan keponakannya menjadi Ketua Bidang Kesra di LMD (Lembaga Musyawarah Desa). Dengan demikian, pengaruh kepala dukun semakin kuat di pemerintahan Desa Ngadisari.

Kepala desa adalah jabatan tertinggi di Kantor Desa Ngadisari. Jabatan tersebut, sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dibatasi hanya 8 tahun. Pada saat dicalonkan menjadi kepala desa, pak Sapawi adalah calon tunggal. Saat pemilihan kepala desa berlangsung tahun 1988 disediakan dua kotak agar terlihat demokratis. Ternyata, dari semua penduduk yang berhak memilih yakni yang telah berusia 17 tahun dan atau yang telah menikah diperoleh perhitungan suara ada beberapa orang yang mengisi kotak kosong. Kondisi tersebut diketahui oleh pak Sapawi. Bahkan, ia menyadari ada orang-orang yang ingin menyebar duri pada masa kepemimpinannya, tetapi pak Sapawi berprinsip akan terus menabur bunga sebagai perwujudan keyakinan ajaran *karmapala*. Warga masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan kepala desa lebih suka membuat intrik di belakang daripada bicara di depan orang yang bersangkutan atau di depan forum LMD. Keadaan tersebut yang mendorong pak Sapawi melibatkan kepala desa yang lama, pak Sukartjo, untuk duduk di LMD sebagai Ketua Bidang I Pemerintahan untuk mengimbangi pengaruh Ketua Bidang Kesra yang masih keponakan dari kepala dukun. Dengan demikian, secara politis pemerintahan desa harus bersifat terbuka kepada masyarakat (LMD). Hal itu diakui oleh mantan Kades, pak Sukartjo, bahwa kepala desa yang sekarang ini bersifat terbuka dan mau mendengarkan perbedaan

pendapat. Hal yang unik, mantan Kades, pak Sukartjo, selain tokoh masyarakat, juga besan dari pak Sapawi (kepala desa). Selain itu, jabatan ketua I LKMD juga dipegang oleh anak pak Sukartjo sehingga lengkaplah sudah bahwa sistem pemerintahan Desa Ngadisari masih menggunakan pola hubungan kekerabatan.

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan kepada pemerintah Dati II Probolinggo agar memperhatikan sistem pemerintahan desa dalam memilih wakil rakyat dari Golongan Karya karena dapat mengganggu mekanisme pemerintahan dan pengendalian sosial di tingkat desa, seperti yang pernah dialami oleh kepala dukun, pak Suja'i.

Pada masa pemerintahan pak Sukartjo, mantan kades Ngadisari, bahkan sebelumnya juga sudah dikenal pemberian gelar bagi kepala desa dari masyarakat yang pada masa pemerintahan kepala desa yang baru tidak diteruskan. Pemberian gelar tersebut secara administratif tidak melanggar prinsip, bahkan dapat memberi identitas khas bagi masyarakat Tengger karena gelar-gelar tersebut, seperti *Sukorejo* atau *Podotresno* mempunyai arti yang positif dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya tradisional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arifin, Edy Burhan. 1993/1994. Laporan Penelitian: *Dukun dan Peranannya dalam Perubahan Sosial di Tengger*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Jember. Pusat Penelitian.

Dherana, Tjokorde Raka. 1979. *Sekilas tentang Hukum Adat dan Kebudayaan di Desa Mororejo (Studi Lapangan di Daerah Tengger)*. Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.

Hefner, Robert W. 1985. *Hindu Javanese. Tengger Tradition and Islam*. Princenton, New Jersey: Princeton University Press.

Kumpulan Materi: *Seminar Evaluasi hasil Penelitian Madura, Jawa dan Nisantara*, Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Marianno, Frans Priyohadi dkk. 1993/1994. *Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial di Daerah Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Jawa Timur.

Suprayitno. Thesis Magister. 1994. *Implikasi Pengembangan Pariwisata terhadap Perilaku, Peluang Kerja, dan Pendapatan Penduduk Lokal*. Studi Kasus Suku Tengger di Daerah Pariwisata Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Program Studi Kependudukan, Jurusan Antar Bidang, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Waluyo, Harry dkk. 1993. *Dukungan-Dukungan Budaya terhadap Perkembangan Ekonomi* (Studi Kasus Pariwisata di Desa Ngadisari, Kecamatan Probolinggo, Propinsi Jawa Timur). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.

Wibisono, Singgih. 1956 dalam Bahasa dan Budaya. Majalah Populer yang berdasarkan Ilmu Pengetahuan tentang Bahasa dan Budaya. Tahun IV No. 3 Pebruari 1956. Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Widyaprakosa, Simanhadi. 1994. *Masyarakat Tengger Latar Belakang Daerah Taman Nasional Bromo*. Yogyakarta: Kanisius.

PEDOMAN WAWANCARA PEMERINTAHAN TRADISIONAL

Pemerintahan Tradisional adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, budaya ekonomi, religi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah dikenal di masa lampau.

Bagaimana pemerintahan tradisional dijalankan?

Bidang Politik:

1. Siapa yang menjalankan pemerintahan tradisional;
2. Persyaratan menjadi penguasa tradisional;
3. Sumber Hukum:
 - 3.1. Hukum Nasional
 - 3.2. Hukum Agama
 - 3.3. Hukum Adat
4. Mekanisme Pengawasan/Sanksi
5. Kedudukan dan Peranan Golongan Elit Penguasa
6. Hak dan Kewajiban Penguasa Politik
7. Hak dan Kewajiban Rakyat
8. Perangkat Birokrasi
9. Pungutan/Lain-Lain
10. Pengambilan Keputusan (LMD)
11. Proses Pergantian Penguasa Politik

Bidang Ekonomi:

1. Tanah
 - 1.1. Pola Penguasaan
 - 1.2. Pola Pemilikan
 - 1.3. Pola Penggunaan
2. Perdagangan Hasil Pertanian
3. Harga Sembilan Bahan Pokok
4. Rumah Makan atau Restoran
5. Homestay
6. Karang Taruna

Bidang Sosial Budaya dan Religi:

1. Kerukunan Hidup Bertetangga
2. Kegiatan olah raga dan kesenian
3. Kerukunan intern umat beragama
4. Kerukunan antar umat beragama
5. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah

Bidang Pembangunan:

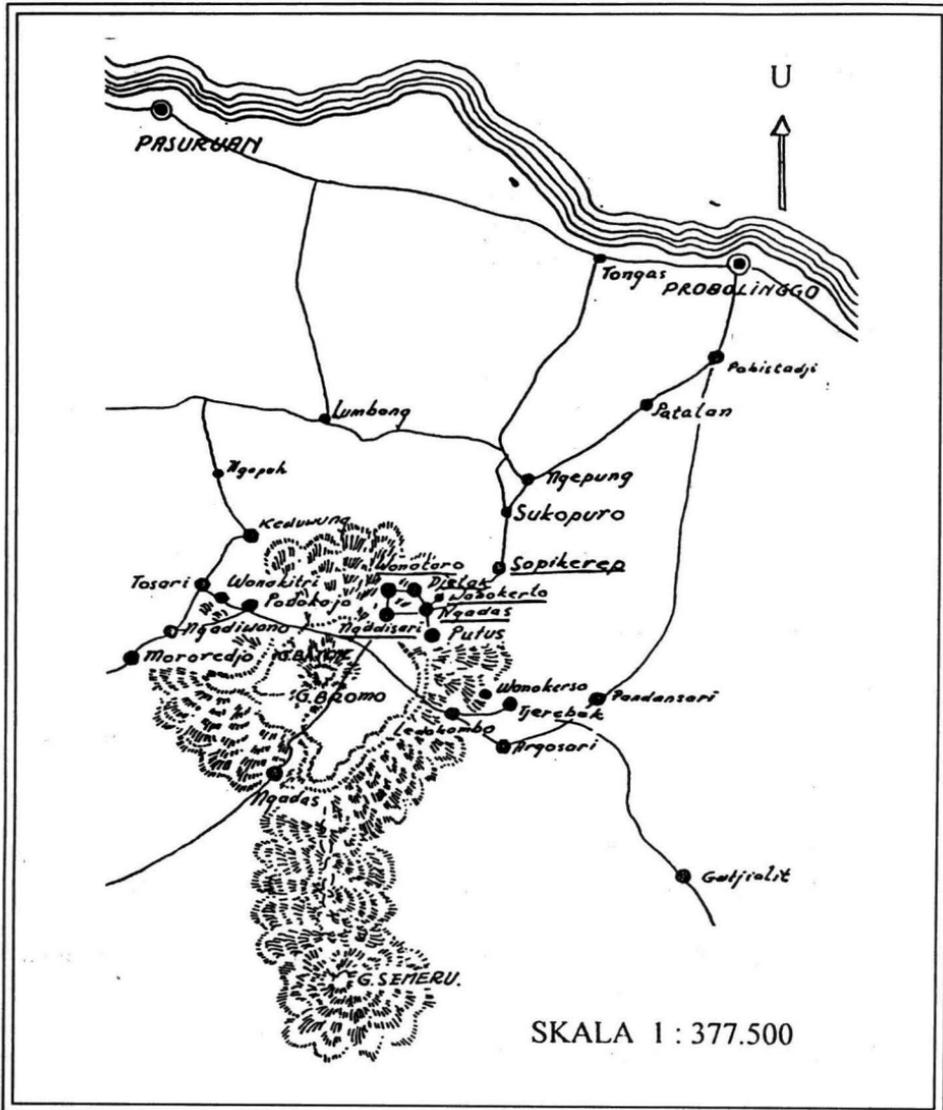
1. Prasarana (jalan, listrik, air)
2. Pembangunan Sarana Umum:
 - 2.1. Peribadatan
 - 2.2. Terminal
 - 2.3. Kantor Desa
 - 2.4. Fasilitas Umum lainnya
3. Kesehatan
4. Lingkungan Hidup

Bidang Administrasi dan Teknis:

1. Fungsi Kantor Desa sebagai sumber data, pusat pengolahan, dan pelayanan
2. Sarana Perkantoran
3. Kebersihan dan Keindahan
4. Data Wilayah (monografi, peta, struktur organisasi pemerintahan desa)
5. Buku Administrasi Desa dan Model-Model yang telah diterapkan
6. Administrasi Keuangan

Bidang Keamanan dan Ketertiban

1. Kriminalitas
2. Gardu-gardu ronda dan kelengkapannya
3. Perjudian, kenakalan remaja, dan sejenisnya
4. Eks Tapol G30S/PKI
5. Kesadaran Bela Negara
6. Musibah atau bencana alam



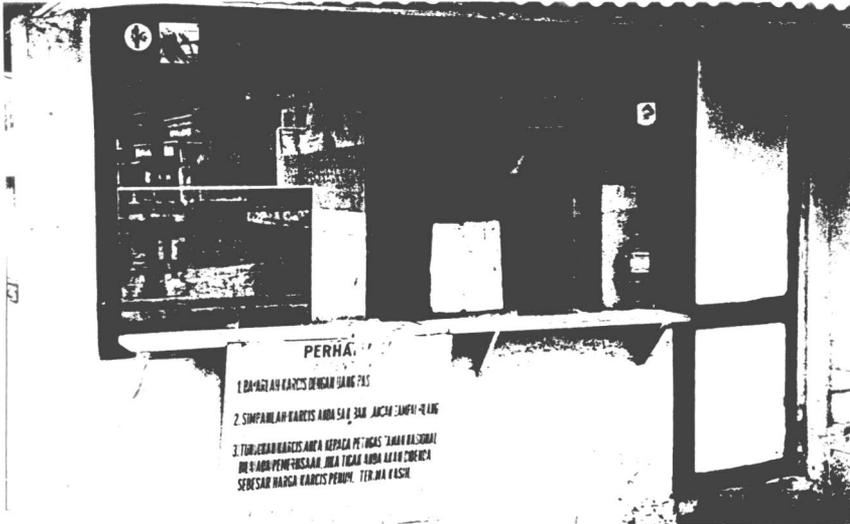
Sumber: Hindu Javanese. *Tengger Tradition and Islam*. Princeton New Jersey: Princeton University Press.

Peta 1 : Lokasi Desa Sampel



Gambar 1

Pintu masuk gapura di kawasan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo.

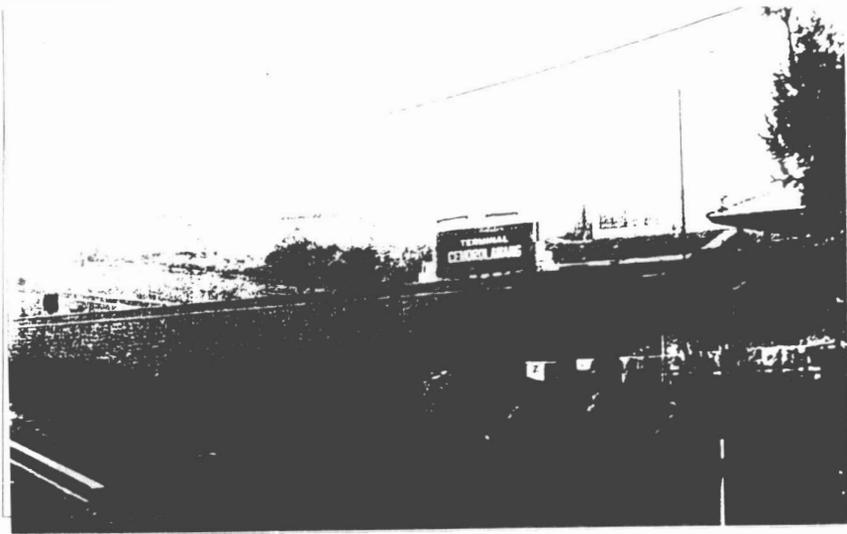


Gambar 2

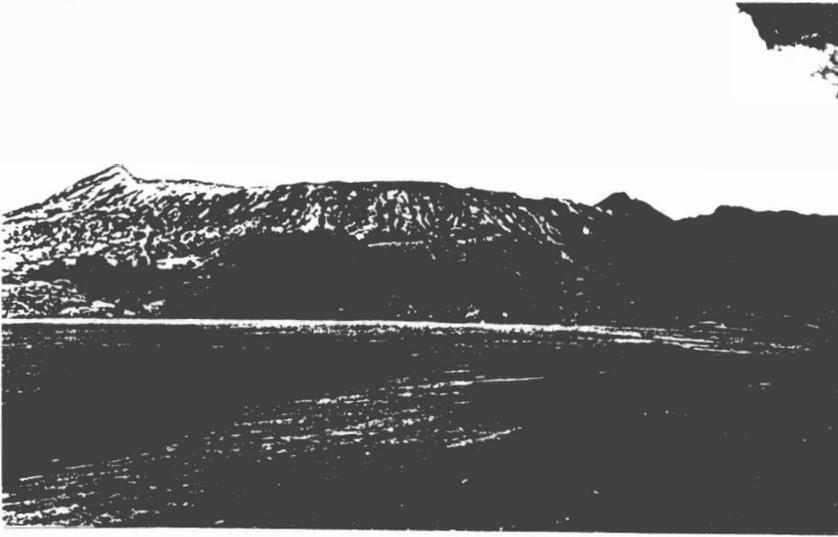
Loket karcis masuk Gunung Bromo entrance fee Mt. Bromo Rp 2.100,00



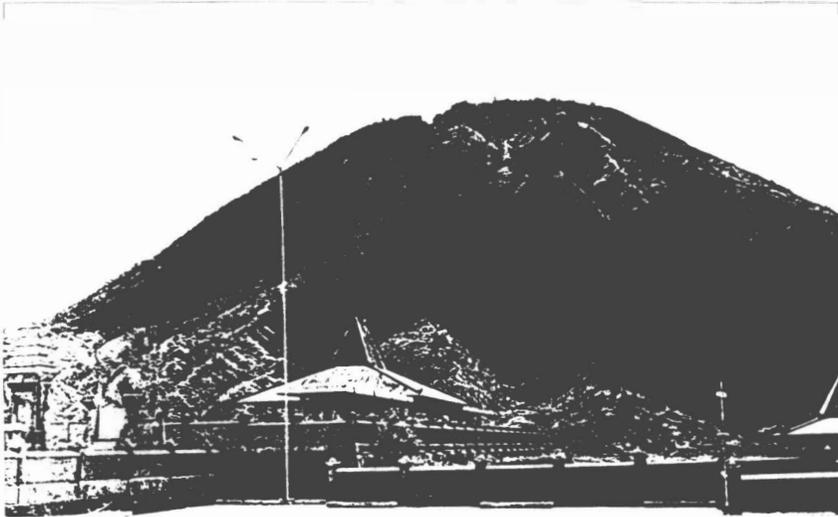
Gambar 3
Petugas retribusi parkir kendaraan di Desa Ngadisari



Gambar 4
Situasi terminal Cemoro Lawang



Gambar 5
Panorama Gunung Bromo



Gambar 6
Panorama Gunung Batok



Gambar 7

Tempat sembahyang masyarakat Tengger yang relatif luas di Gunung Bromo



Gambar 8

Suasana terminal Ngadisari dan toko souvenir tampak lengang sejak dibukanya terminal Cemoro Lawang



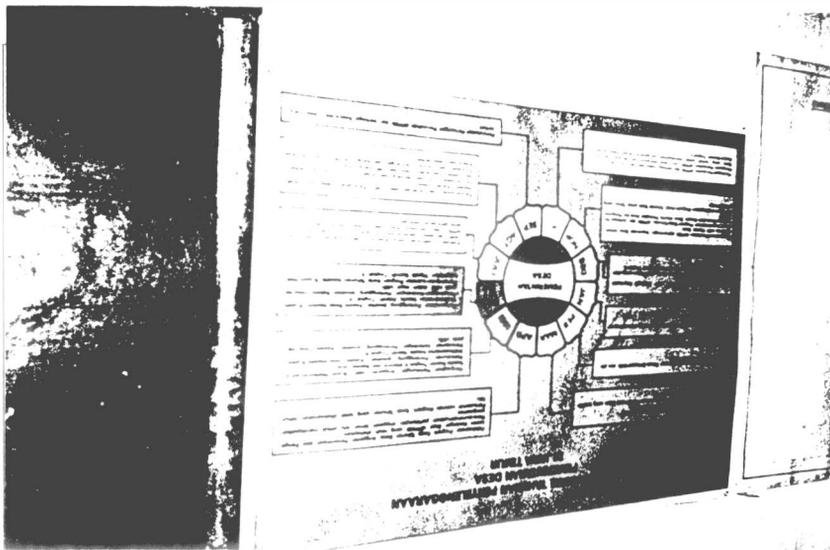
Gambar 9

Salah satu homestay milik penduduk Desa Ngadisari



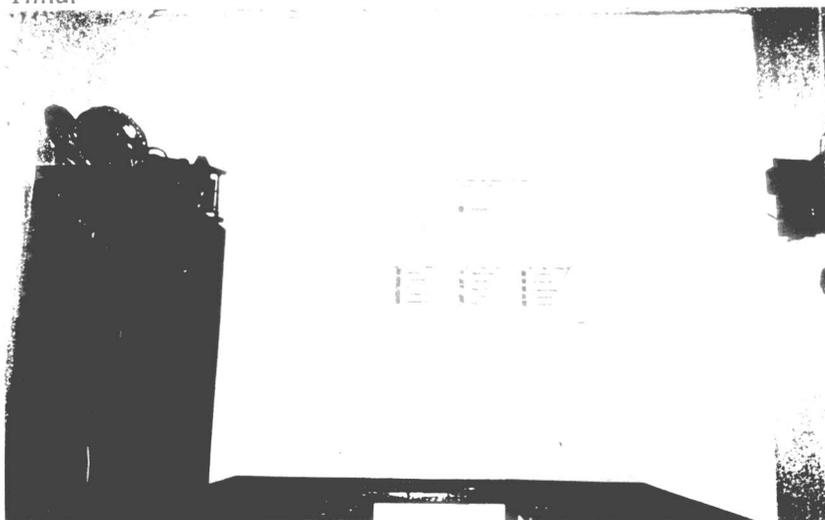
Gambar 10

Susunan personil yang bertugas di Desa Ngadisari



Gambar 11

Jadwal mekanisme tahunan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Jawa Timur



Gambar 12

Struktur organisasi Lembaga Masyarakat Desa (LMD)



Gambar 13
Kantor Desa Ngadisari



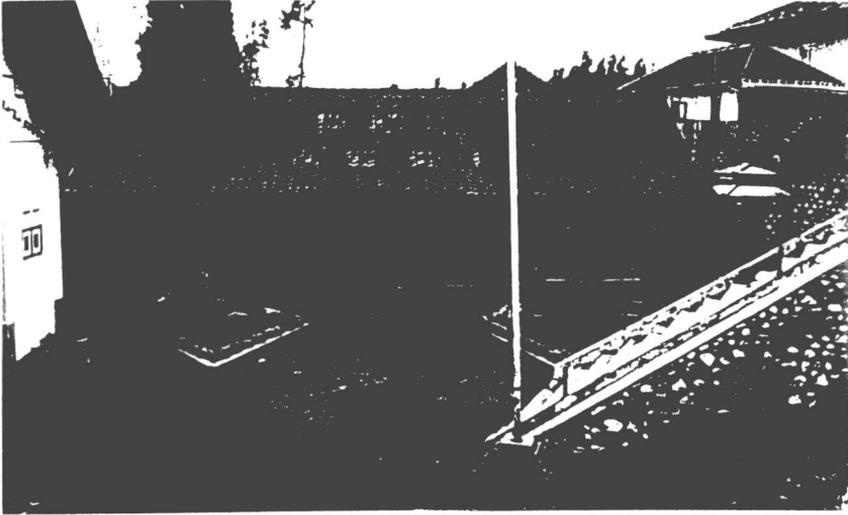
Gambar 14
Seorang dukun sedang membacakan mantra untuk hewan kurban sebagai salah satu syarat pelaksanaan pesta perkawinan



Gambar 15
Kentongan sebagai tanda informasi



Gambar 16
Balai Desa berfungsi pula untuk tempat pertemuan umum seperti hajat perkawinan. Balai desa berfungsi selain untuk kepentingan desa juga untuk tempat pertemuan umum.



Gambar 17
Kantor Desa Ngadisari



Gambar 18
Bangunan Panti PKK yang digunakan untuk kegiatan PKK dan LKMD.
Di sebelah bangunan terdapat bangunan yang digunakan untuk kegiatan Karang Taruna Joko Seger



Gambar 19

Kendaraan Umum dari Probolinggo menuju Cemoro Lawang tarif kendaraan ini Rp 1.200,00 sekali jalan



Gambar 20

Petugas Hansip sedang berdiri di depan Pos Jaga



Gambar 21

Kendaraan Jeep Toyota yang antri menunggu penumpang. Perhatikan bentuk gapura yang terletak di depan jeep, Gapura ini biasanya digunakan untuk bangunan ibadat agama Buddha



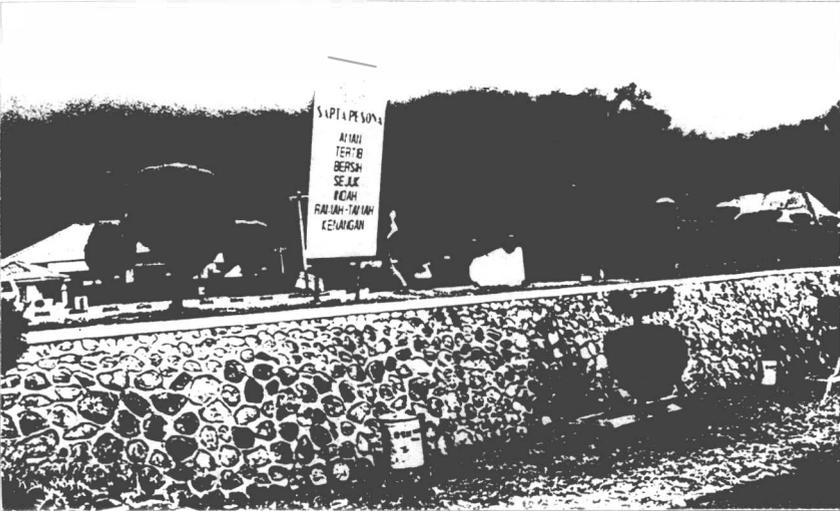
Gambar 22

Suasana toko souvenir yang sepi di terminal Ngadisari karena memindahkan kegiatannya di pintu masuk kendaraan di kawasan Bromo



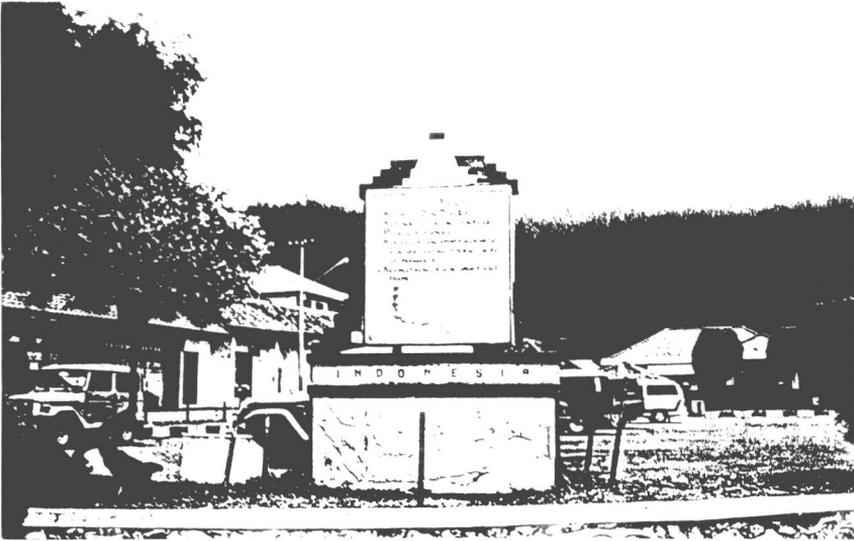
Gambar 23

Tempat pertunjukkan kesenian tradisional yang terletak di Terminal Ngadisari milik Mandala Wisata



Gambar 24

Papan Sapta Pesona, Aman Tertib Bersih Sejuk Indah Ramah Tamah Kenangan, yang terletak di depan kantor desa Ngadisari



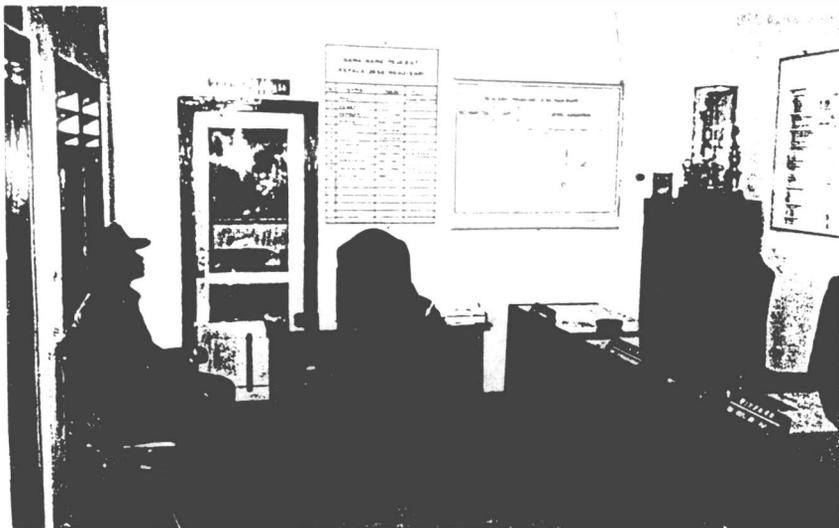
Gambar 25

Monumen Pancasila yang terletak di depan Kantor Desa Ngadisari



Gambar 26

Fasilitas telpon umum sudah masuk ke desa Ngadisari sejak tahun 1994. Telpon umum ini terletak di depan Pos Jaga Hansip



Gambar 27

Tata letak Kantor Sekretariat Desa Ngadisari. Meja Sekretaris Desa di bagian muka dan meja-meja Kepala Urusan berjajar di sisi sebelah kanan



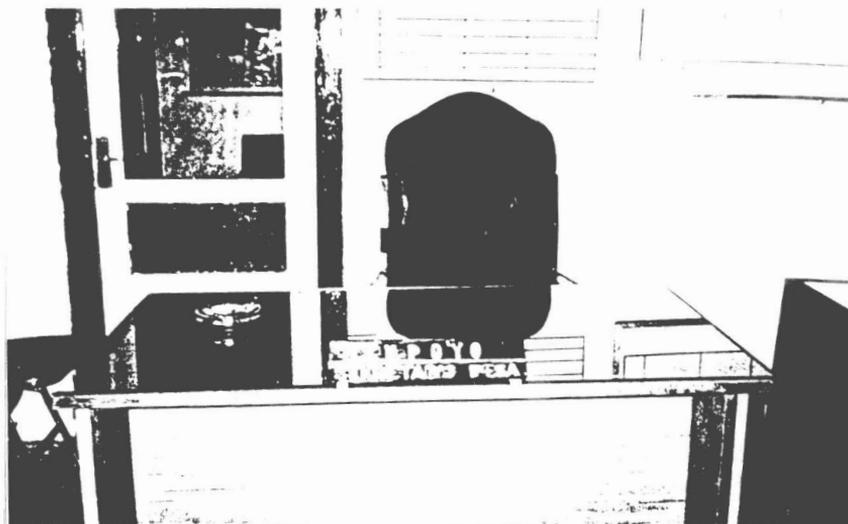
Gambar 28

Bagian dalam kantor kepala desa terdapat panji teladan bakti, buku-buku peraturan pemerintah dan sebagian piala



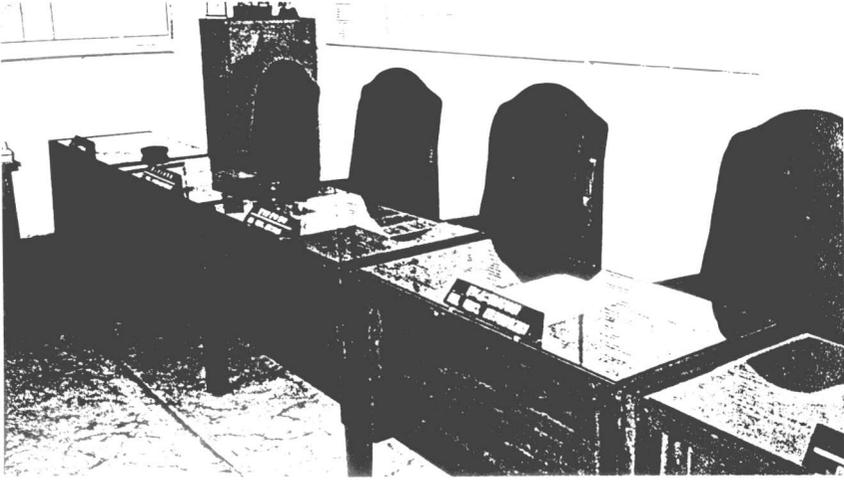
Gambar 29

Papan Monografi Desa. Pada bagian atas terdapat foto presiden, wakil presiden dan Lambang burung garuda Pancasila



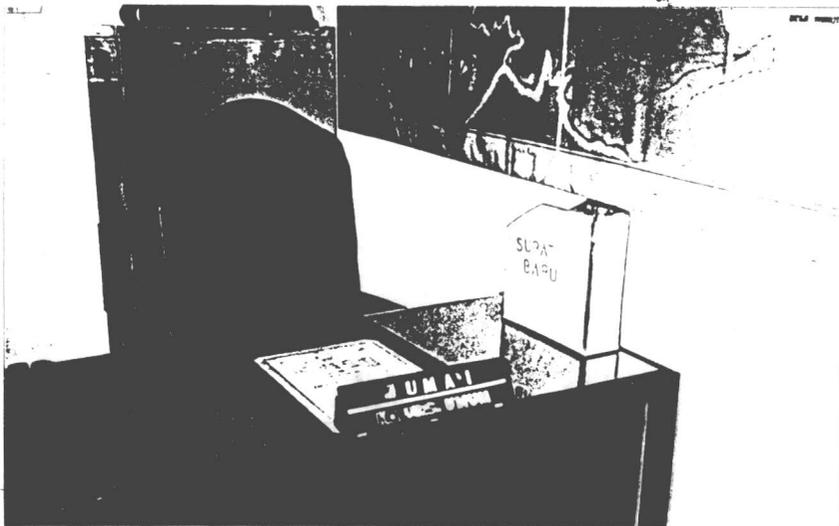
Gambar 30

Meja kerja Sekretaris Desa merangkap Kepala Urusan Pemerintahan



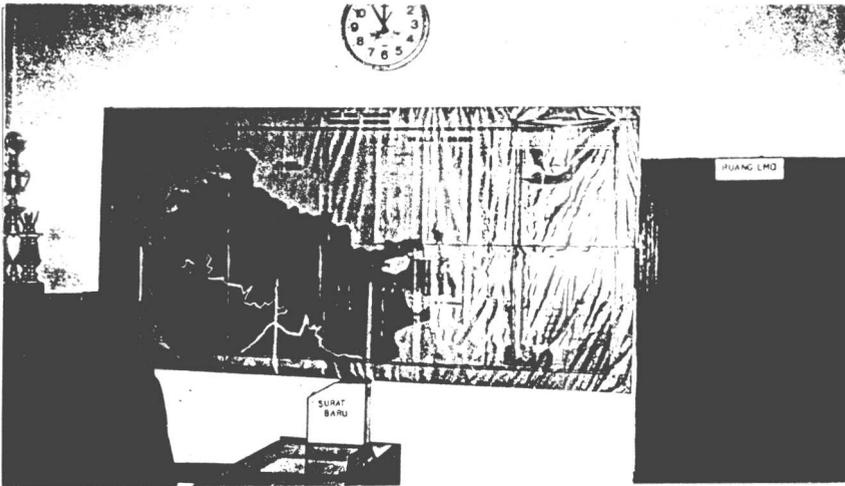
Gambar 31

Meja-meja kerja Kepala Urusan yang berjajar rapih di atas meja terdapat papan nama lengkap dengan nama dan jabatannya



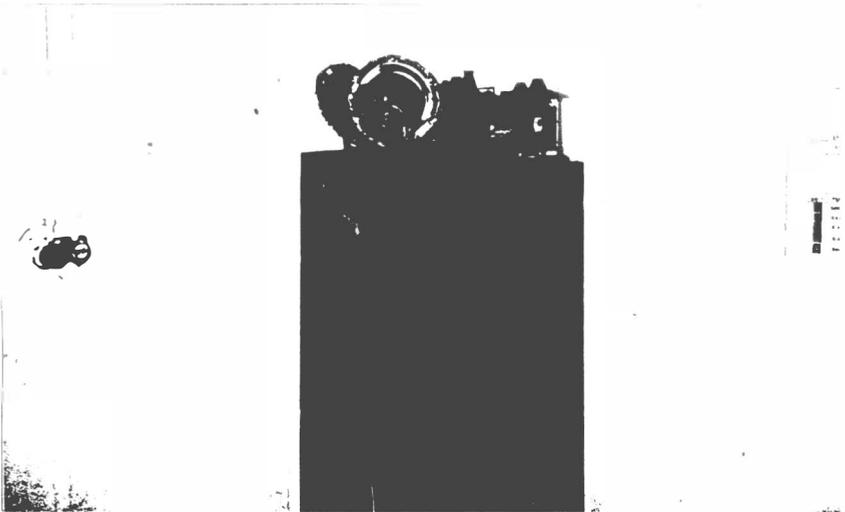
Gambar 32

Meja kerja Kepala Urusan Umum. Di atas meja terdapat papan nama dan jabatannya



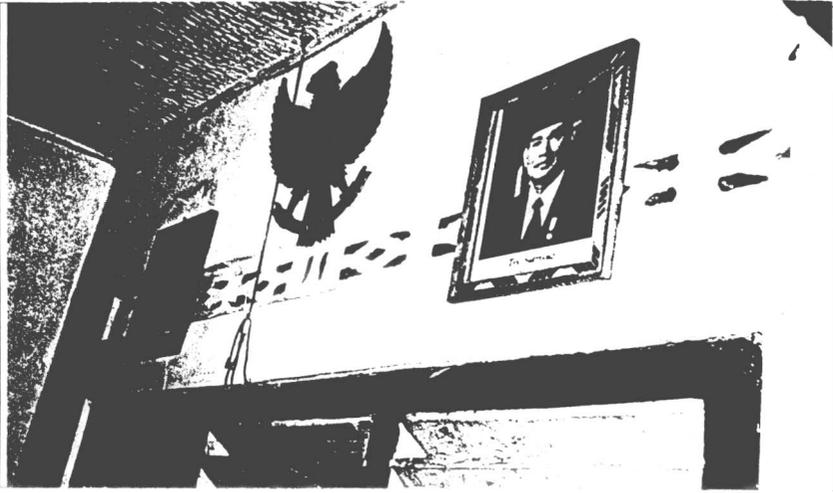
Gambar 33

Peta Desa Ngadisari, di sisi kanan adalah pintu masuk ruang LMD yang berhadapan dengan pintu masuk ruang Kepala Desa



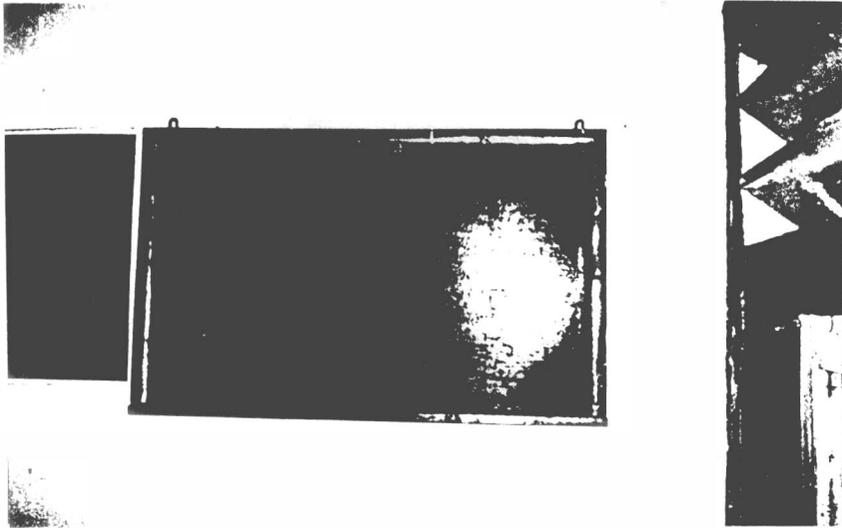
Gambar 34

Sebagian tanda kenang-kenangan yang diletakkan di atas lemari yang terdapat di ruang LMD



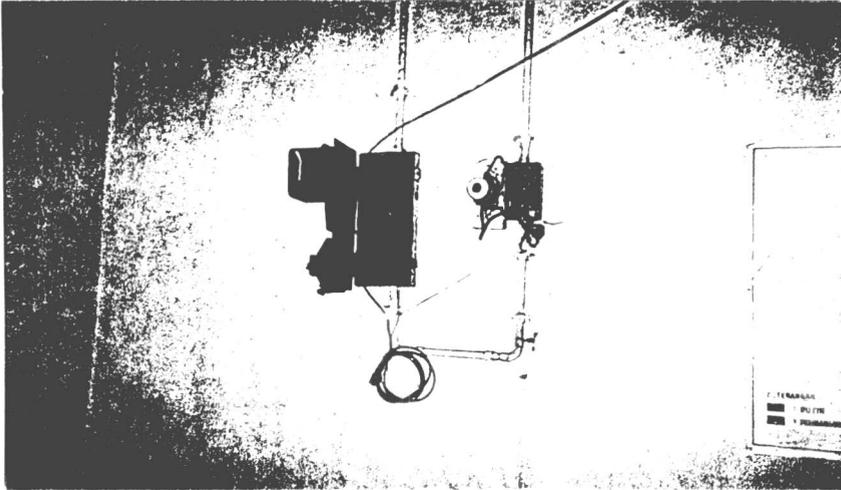
Gambar 35

Foto presiden dan wakil presiden. Bagian tengah foto terdapat lambang Bhinneka Tunggal Ika. Foto ini terdapat di ruang LMD



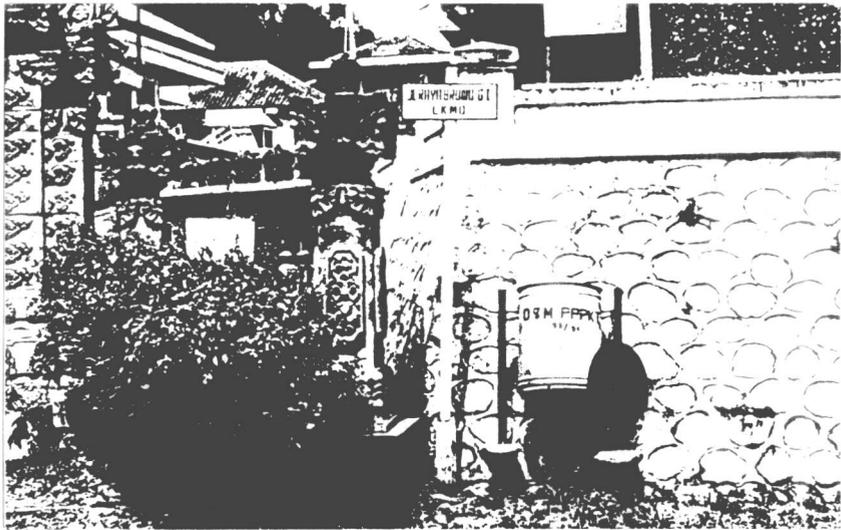
Gambar 36

Papan tulis yang terdapat di ruang LMD



Gambar 37

Instalasi listrik di ruang LMD yang tidak terpasang rapih



Gambar 38

Taman di sisi kiri dan kanan gapura desa Ngadisari dan papan jalan yang dibuat oleh LKMD



Gambar 39

Tanaman bunga di sekitar Kantor Desa Ngadisari yang ditanam oleh LKMD



Gambar 40

Kepala Desa Ngadisari Bapak Sapawi dengan pakaian dinas berdiri di depan rumah sebelum berangkat tugas



Gambar 41

Bapak Sapawi dalam pakaian sehari-hari terlihat sedang menyaksikan pembacaan mantera sebelum pemotongan hewan kurban



Gambar 42

Bapak Sapawi ke luar dari pos jaga mengambil kunci kantor kepala desa



Gambar 43

Bapak Sapawi dalam pakaian dinas berbicara dengan pengemudi angkutan jeep sebelum berangkat tugas



Gambar 44

Bapak Sapawi sedang menawar duren di depan Warung Bromo



Gambar 45

Pedagang mainan anak sedang mengangkut barang dagangannya pada bagian belakang terlihat kios bensin



Gambar 46

Pedagang kelontong yang menjajakan barang dagangannya di muka rumah penduduk. Di sebelahnya adalah pedagang kebutuhan sehari-hari



Gambar 47

Produk pertanian yang akan dijual ke Probolinggo diangkut dengan angkutan pick up



Gambar 48

Petugas pengangkut sampah dari Pemda Dati II Probolinggo



Gambar 49

Orang tua Tengger senang duduk di pinggir jalan pada pagi hari untuk menghangatkan badan dari sinar matahari



Gambar 50

Rumah Kepala Urusan Pemerintahan Desa yang merangkap sebagai Sekretaris Desa terletak dipinggir jalan Raya Bromo



Gambar 51

Rumah sementara yang dibangun di ladang untuk tempat beristirahat manakala lelah bekerja



Gambar 52

Gapura yang terletak di Terminal Ngadisari seperti bentuk gapura Buddha



Gambar 53

Suasana Terminal Cemoro Lawang pada siang hari tampak lengang



Gambar 54

Bangunan Mushala di Terminal Cemoro Lawang. Pada sisi kiri jalan terlihat tarif sewa kuda. Jalan ini menuju tempat sewa kuda



Gambar 55

Jalan menuju Terminal Cemoro Lawang, pada sisi kanan terdapat pos penjagaan. Terlihat penunggang kuda menuju tempat persewaan kuda



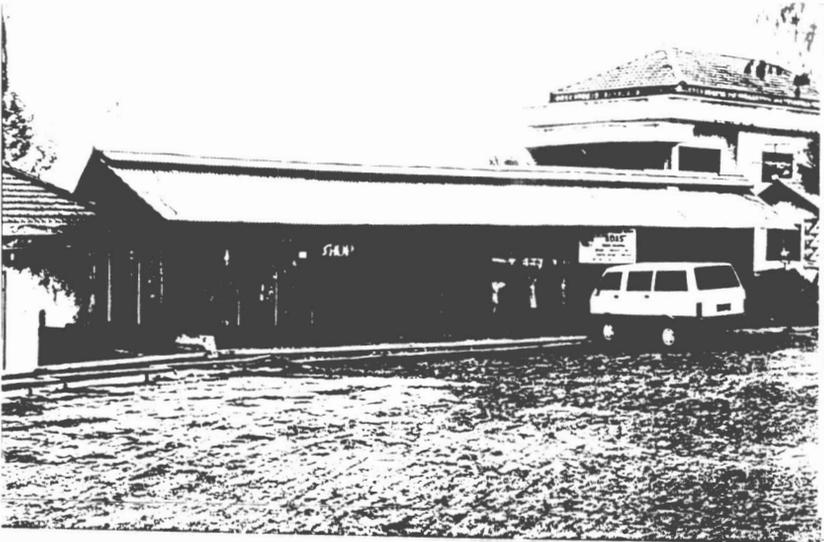
Gambar 56

Kendaraan umum (taxi) sedang menunggu penumpang di pinggir jalan Terminal Cemoro Lawang



Gambar 57

Toko Cenderamata di pintu pelataran parkir sebelum ke gunung Bromo



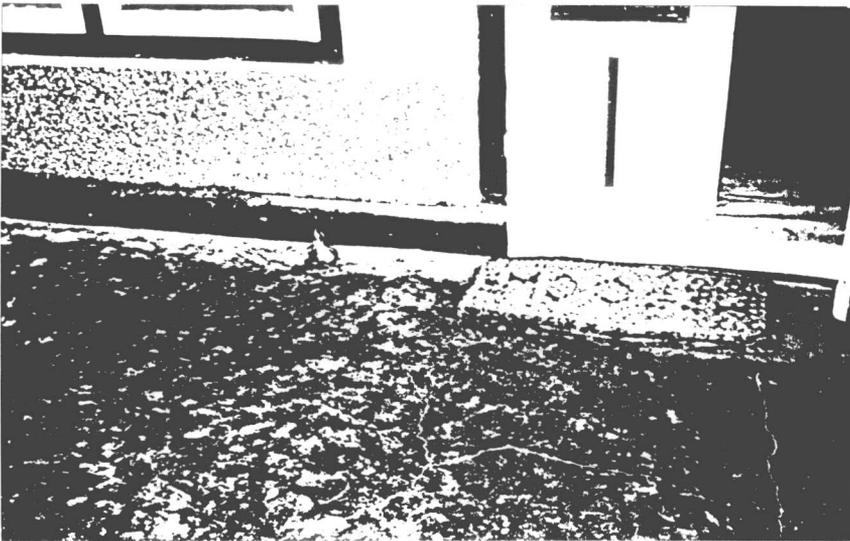
Gambar 58

Pelataran parkir kendaraan dekat pintu masuk wisatawan yang akan ke gunung Bromo terlihat lengang



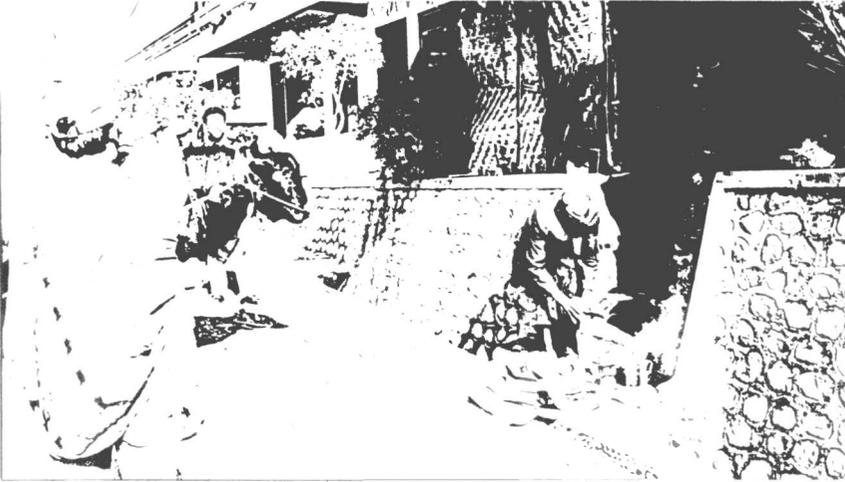
Gambar 59

Poten dilihat dari arah Gunung Bromo



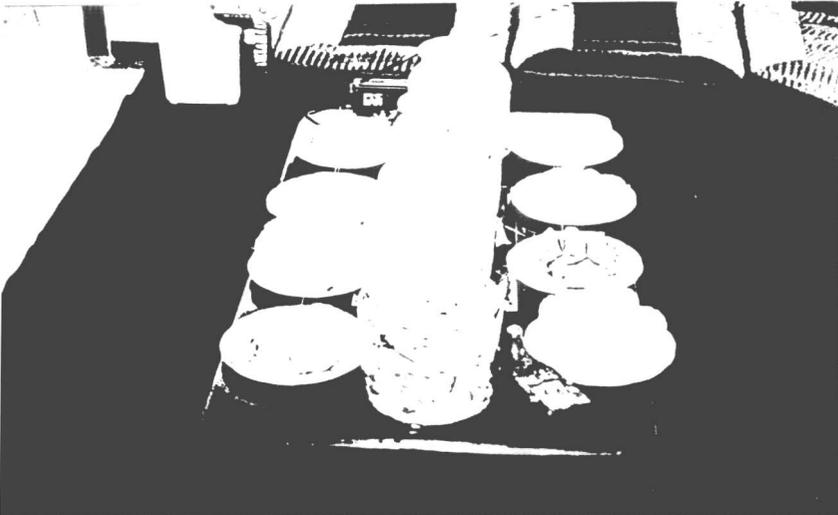
Gambar 60

Sesajen untuk roh leluhur yang diletakkan di muka pintu Kantor Desa Ngadisari



Gambar 61

Kepala dukun sedang mempersiapkan *prasen* sebelum dibacakan mantera untuk memotong hewan kurban dalam suatu hajjat perkawinan



Gambar 62

Makanan jajan pasar di dalam toples adalah kue-kue ringan yang dibeli di toko



Gambar 63

Petugas Retribusi Taman Wisata Bromo



Gambar 64

Puskesmas Pembantu yang berada di wilayah desa Wonotoro, letaknya sangat berdekatan dengan batas desa Ngadisari

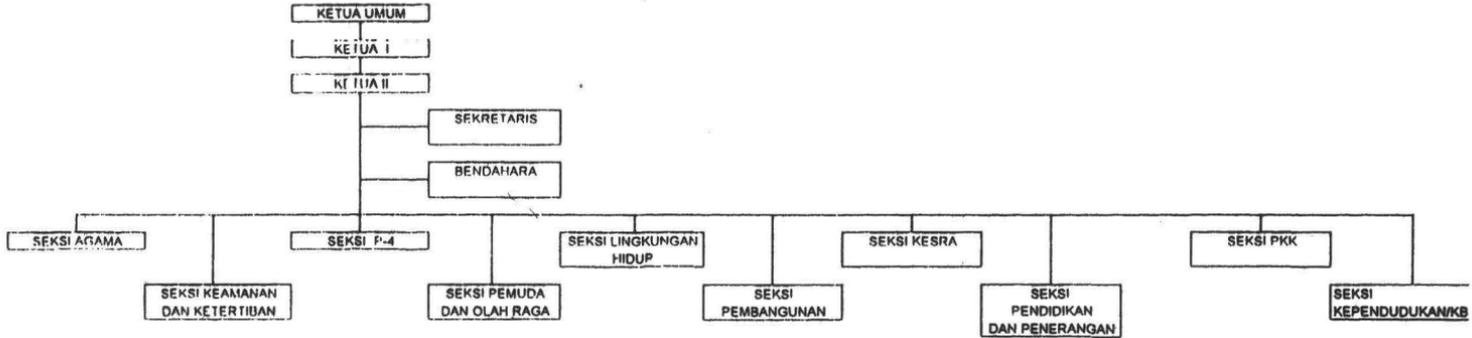
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT
DESA NGADISARI



STRUKTUR LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD)
DESA NGADISARI



STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LKMD)



STRUKTUR ORGANISASI HANSIP

